

**DISERTASI**



**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
PENGANGGURAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT  
IN THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN*

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor  
Disusun dan diajukan oleh**

**PITHER PALUNGAN  
P050010037**



**Kepada**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## DISERTASI

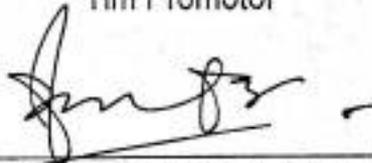
### ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disusun dan diajukan oleh :

**PITHER PALUNGAN**  
**P0500310037**

telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi  
pada tanggal **30 Mei 2016** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

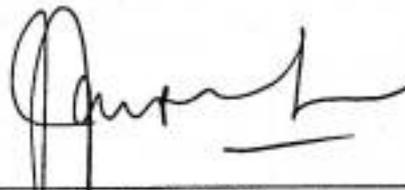
Tim Promotor



**Prof. Dr. I. Made Benyamin, M.Ec**  
Promotor



**Dr. Paulus Uppun, SE., MA**  
Kopromotor I



**Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA**  
Kopromotor II

Ketua Program Studi  
Ilmu Ekonomi,



**Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : PITHER PALUNGAN

NIM : P050010037

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Mei 2016

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, penulisan disertasi ini berjudul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur".

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, substansi keilmuan, maupun materil secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya disertasi ini. Rasa penghargaan dan terima kasih yang tinggi penulis sampaikan terutama yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Muh. Ali, SE.,M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si., Ak., CA.
2. Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin yang telah memberi nasehat dan semangat dalam menjalankan studi.
3. Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA. Sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi periode 2010 – 2014, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi dan senantiasa memberikan dukungan profesional atas penyelesaian studi penulis.
4. Kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan dengan setulusnya kepada yang terhormat Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec. selaku Promotor dengan kesediaan yang tulus membimbing dan mengarahkan serta memotivasi sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.

5. Kepada Dr. Paulus Uppun, SE.,MA dan Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE.,MA selaku Co Promotor, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya atas kesediaan membimbing dan mengarahkan serta memotivasi dengan sepenuh hati sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
6. Mengucapkan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada: Terhormat seluruh dosen pengajar mata kuliah Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Dosen penguji Prof. Dr. Salamun Pasda, M.Sc selaku penilai eksternal, Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, MA. Prof. Dr. Rahmatia, MA, Dr. Madris, DPS, SE.,M.Si. Dr. Sanusi Fattah, SE.,M.Si. dan Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.,Ph.D, M.Si.
7. Terhormat Rektor Universitas Borneo Tarakan, Dr. Bambang Widigdo, M.Sc. Syaiful Anwar, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Asih Kusuma Wijayanti, SE.,M.Sc selaku ketua Jurusan, serta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan yang memberikan kesempatan, motivasi baik moril maupun materil.
8. Kepada kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan banggakan Ayahanda Silas Tiroan (Alm) dan Ibunda Damaris Banne serta mertua Ayahanda Yohanis Tampang (Alm) dan Ibunda Tabita Tampang atas doa, motivasi dan pengorbanan yang luarbiasa, dengan penuh cinta kasih telah membesarkan, mendidik, membimbing sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada Istri tercinta Naomi Nety serta anak-anak George Zevanya Ronaldo Pither, Gabriel Fortunatus Otniel Pither, dan Gracilia Eirene Engeline Pither, atas segala pengertian, kasih sayang, pengorbanan, doa, kesabaran, dan motivasi selama ini.
10. Kepada segenap keluarga yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
11. Rekan-rekan angkatan 2010 Program Doktor Ilmu Ekonomi dan kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan telah memberikan semangat dan motivasinya. Kiranya Tuhan Sumber

segalah Hikmat dan Pengetahuan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sadar sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan serta kekhilafan yang ada pada tulisan ini. Dengan rendah hati penulis harapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang sifatnya membangun.

12. Akhirnya semoga apa yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa mungkin dalam penulisan disertasi ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itu penulis mohon maaf serta terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif. Semoga penelitian ini dapat menjadi embrio untuk lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Makassar, 30 Mei 2016

**PITHER PALUNGAN**

## ABSTRAK

**PITHER PALUNGAN.** Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur (dibimbing oleh I Made Benyamin, Paulus Upun, dan Indraswati Tri Abdireviane).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji (i) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi, (iii) pengaruh inflasi terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel (penelitian eksplanatori). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder dari 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka digunakan model persamaan *structural (structural model)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien 0,191, maupun secara tidak langsung melalui variabel investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien 0,132. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pengangguran melalui variabel variabel investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif signifikan secara langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien -0,084, maupun secara tidak langsung melalui variabel investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

## ABSTRACT

**PITHER PALUNGAN.** Analysis of Economic Growth and Unemployment in the province of East Kalimantan (guided by I Made Benyamin, Paulus Upun, and Indraswati Tri Abdireviane)

This study aims to identify and examine (i) the effect of government spending education and health sectors to unemployment through investment, quality of human resources, and economic growth, (ii) the effect of government spending infrastructure on unemployment through investment, quality of human resources, and economic growth, (iii) the effect of inflation on unemployment through investment, quality of human resources, and economic growth.

This study describes causal relationships between variables (explanatory research). The data used in this research is quantitative data and data sources used are secondary data. Data collection methods used in this research is the method of documentation or literature. This study entirely using secondary data from 14 district/city in East Kalimantan Province 2008-2014. The analytical method used in this research is descriptive qualitative and quantitative analysis. In testing the hypotheses that have been formulated, then used a structural equation model (structural model).

The results of this study indicate that government spending on education and health are directly significant effect on unemployment with the coefficient of 0.191, or indirectly through the variable investments, the quality of human resources, economic growth. Government spending in infrastructure no significant impact directly on unemployment with the coefficient of 0.132. Government spending in infrastructure have a significant effect on unemployment indirectly via investment variables, the quality of human resources, economic growth. Inflation significant negative effect directly on unemployment with the coefficient of -0.084, and indirectly through the variable investments, the quality of human resources, economic growth.

**Keywords:** Government spending the education, health and infrastructure, inflation, investment, economic growth and unemployment.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK INDONESIA	vi
ABSTRACT INGGRIS	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Kegunaan Penelitian	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>19</b>
2.1. Telaah Teoritis tentang pengeluaran pemerintah	19
2.2. Telaah Teoritis tentang inflasi	24
2.3. Telaah Teoritis tentang investasi	29
2.4. Telaah Teoritis tentang kualitas sumber daya manusia	33
2.5. Telaah Teoritis tentang pertumbuhan ekonomi	38
2.6. Telaah Teoritis tentang pengangguran	49
2.7. Keterkaitan teori dan kajian empiris pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi	55

2.8. Keterkaitan teori dan kajian empiris antara pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi	62
2.9. Keterkaitan teori dan kajian empiris antara inflasi terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi	67
2.10. Penelitian Empiris	69
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	<b>76</b>
3.1. Kerangka Konseptual Penelitian	76
3.2. Hipotesis Penelitian	86
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>87</b>
4.1. Rancangan Penelitian	87
4.2. Jenis dan Sumber Data	87
4.3. Metode Pengumpulan Data	89
4.4. Metode dan Teknik Analisis Data	89
4.5. Definisi Operasional	95
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>	<b>97</b>
5.1. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur	97
5.1.1. Pengeluaran Pemerintah	97
5.1.2. Inflasi	99
5.1.3. Investasi	100
5.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	101
5.1.5. Pengangguran	102
5.2. Kondisi Makro Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/Kota	103
5.3. Hasil Analisis <i>Structural Model</i>	104
5.3.1. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran	107

5.3.2. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran	108
5.3.3. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran	109
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b>	<b>119</b>
6.1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran	119
6.2. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi	124
6.3. Inflasi berpengaruh terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi	129
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>139</b>
7.1. Simpulan	139
7.2. Saran	141
7.3. Kontribusi Penelitian	142
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>146</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Kalimantan Timur	9
5.1. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kalimantan Timur	98
5.2. Laju Inflasi di Kalimantan Timur	99
5.3. Investasi di Kalimantan Timur	100
5.4. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur	101
5.5. Pengangguran di Kalimantan Timur	102
5.6. Kondisi Makro Ekonomi tingkat Kabupaten/Kota	103
5.7. Hasil Estimasi	104
5.8. Hubungan Tidak Langsung	106
5.9. Hubungan Total	107
5.10. Hubungan Total	108
5.11. Hubungan Total	109

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Pengeluaran Pemerintah pada berbagai bidang	10
3.1. Kerangka pikir Penelitian	84
5.1. Hubungan Fungsional antar variabel	105

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Masalah pengangguran tidak dapat dipisahkan dari kondisi negara-negara berkembang (negara dunia ketiga), permasalahan tersebut juga dihadapi negara-negara maju di dunia. Pada tingkat pengangguran yang tidak terkendali akan meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat. Pengangguran pada umumnya menjadi beban bagi suatu negara, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif (menyeluruh) tentang faktor penyebab pengangguran dengan tujuan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat (Fallahi et al. 2012; Gangji & Plasman, 2008; dan Green, 2000).

Ukuran keberhasilan pembangunan negara atau daerah dapat dinilai melalui rendahnya angka pengangguran. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun jika tidak diiringi dengan hasil pembangunan serta pembukaan lapangan kerja baru maka kesenjangan sosial ekonomi tidak dapat dihindari. Tingkat pengangguran yang meningkat dapat berakibat pada terganggunya stabilitas sosial. Kondisi ini diperparah dengan penambahan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat yang enggan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri.

Pengangguran secara konsep memiliki banyak makna, antara lain pengangguran sebagai istilah bagi orang yang tidak bekerja, sedang

bekerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau orang yang berusaha mendapatkan pekerjaan layak. Dalam konteks penelitian ini lebih ditekankan bahwa pengangguran adalah angka yang menunjukkan tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Pengangguran menjadi masalah besar dalam perekonomian karena dapat berdampak pada tingginya angka kemiskinan dan masalah-masalah sosial.

Pertambahan angkatan tenaga kerja yang tidak diiringi dengan pertambahan kesempatan kerja dari kegiatan-kegiatan ekonomi baru, khususnya di sektor industri, maka akan memperburuk jumlah pengangguran. Di negara-negara berkembang tingkat pertumbuhan ekonomi ternyata tidak sejalan dengan kesempatan kerja baru, sehingga terjadi penambahan angkatan tenaga kerja yang terus berlangsung. Kondisi ini juga dikemukakan dalam temuan Berument, et al. (2006) bahwa kebijakan moneter tidak mampu mengurangi total pengangguran (Sukirno, 2006).

Temuan Funk (2011), kebijakan pemerintah memegang peranan penting khususnya pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh secara efektif menurunkan jumlah pengangguran, temuan ini juga diperkuat dengan temuan Berument et al (2006) bahwa kinerja ekonomi yang membaik dapat menjadi solusi bagi masalah pengangguran. Studi Choudhry et al (2012) menjelaskan bahwa penyebab tingginya angka pengangguran lebih disebabkan karena dampak krisis finansial suatu

negara. Tingkat pengangguran dapat diminimalisir dengan kebijakan nasional yang berlandaskan pada ekonomi global (Eatwell, 2000).

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi makro adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disamping dua tujuan lainnya yaitu stabilitas dan pemerataan serta menurunkan tingkat pengangguran. Indikator ini penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu negara, karena dapat memberikan gambaran makro atas kebijakan yang telah dilakukan, khususnya di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah maupun negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan kesenjangan, baik kesenjangan wilayah, kesenjangan antar penduduk (kesejahteraan masyarakat) dan antar sektor). Ada tiga masalah utama pembangunan ekonomi adalah pengangguran (ketenagakerjaan), kemiskinan dan kesenjangan (ketimpangan distribusi pendapatan), baik kesenjangan antar golongan penduduk, antar sektor, maupun antar daerah/wilayah. Dalam Pengamatan empiris di berbagai negara peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh sekelompok atau sebagian penduduk. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem

sosial secara keseluruhan menuju kepada yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2006).

Pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian pendapatan cenderung memburuk namun pada tahap-tahap selanjutnya akan membaik. Ini dikenal dengan hipotesis U – terbalik. Sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan, hal ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil dan lebih merata akan dapat dicapai dengan lebih baik dan cepat (Kuznets, 1966).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi (Djojohadikusumo, 1993).

Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin

banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah (a) Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan

ekonomi yang modern, (b) Mengembangkan infrastruktur, modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastuktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon, (c) Meningkatkan tabungan dan investasi, pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah.

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat, (d) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi

pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi.

Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, (e) Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap mula dari pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.

Akumulasi modal yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan seberapa besar peran pemerintah dalam sistem perekonomian suatu daerah. Samuelson dan Nordhous (1996) menyebutkan bahwa perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar, artinya bahwa jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi wewenang pasar karena hanya mekanisme pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun dalam hal-hal tertentu menunjukkan bahwa mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu gagal mencapai alokasi yang efisien disebabkan oleh adanya *common goods*, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik, eksternalitas,

*incomplete market*, kegagalan informasi, *unemployment* dan *uncertainty*. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar efisien.

Fenomena tingkat pengangguran pada umumnya dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia, namun pada tahun 2015 tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 118 ribu jiwa (7,17%) dari jumlah angkatan kerja sebanyak 1,53 juta orang (BPS, 2015). Data ini menunjukkan bahwa pengangguran di Kalimantan Timur tertinggi secara nasional. Kondisi ini diperburuk dengan semakin banyaknya pendatang (transmigran) dari berbagai daerah sehingga mempersempit kesempatan kerja di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Sensus Penduduk ditemukan beberapa provinsi yang penduduknya banyak berpindah ke Kalimantan Timur, diantaranya Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Perpindahan penduduk tersebut lebih disebabkan alasan mencari kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Kondisi ini tidak terlepas dari potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur yang melimpah, berupa pertambangan emas, batubara, minyak dan gas bumi, dan hasil hutan.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk yang tidak tergolong daerah padat, meski demikian beberapa daerah hasil pemekaran belum dikelola secara optimal. Disisi lain pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi, sehingga berdampak pada beberapa faktor antara lain pengeluaran pemerintah, inflasi,

investasi, dan pengangguran. Berikut ini disajikan fakta empiris di Kalimantan Timur terkait.

Tabel 1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Kalimantan Timur

Tahun	Pengeluaran Pemerintah		Inflasi (%)	Investasi		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengangguran	
	Rp (juta rupiah)	% Perubahan		PMDN (Dalam Miliar Rupiah)	PMA (USD Juta)		(Jiwa)	%
2008	16.957.882	-	13,25	70	-	5,05	157.376	-
2009	18.313.531	7,99	5,62	7	-	1,40	158.224	0,54
2010	18.929.046	3,36	6,63	7.881,29	988	4,75	166.557	5,27
2011	20.716.489	9,44	7,49	11.828,53	1.104	2,78	173.693	4,28
2012	25.244.953	21,86	5,40	2.290	245	2,48	158.263	-8,88
2013	25.046.948	-0,78	9,65	4.850	136	2,09	163.783	3,49
2014	30.012.728	19,83	7,07	11.050	1.89	4,50	144.086	-12,03

Sumber: Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

Tabel 1.1 menjelaskan kondisi ekonomi makro khususnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Data berperan penting dalam menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang masih mengalami kontraksi pada tujuh tahun terakhir, pada data pengangguran terlihat jumlah pengangguran masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan karena Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi secara nasional.

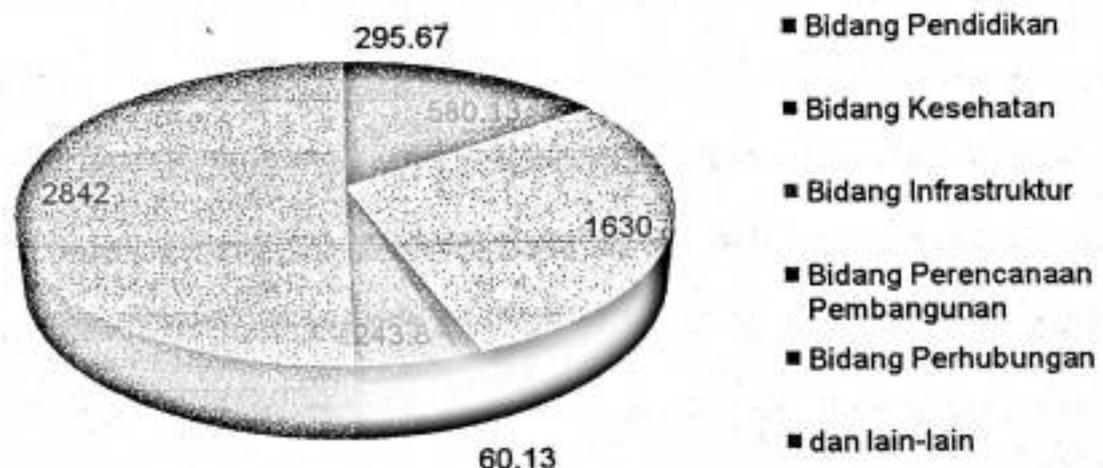
Dalam menurunkan tingkat pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh berbagai faktor. Dalam ruang lingkup regional (Provinsi) maka faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan sebagai sasaran kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan keahlian masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Pirim, et al. 2014).

Perkembangan ekonomi daerah ditentukan oleh besaran pengeluaran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, hal ini didasari atas teori Wagner. Pengeluaran pemerintah yang reproduktif khususnya pada pengeluaran bidang kesehatan masyarakat akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi (Sukirno, 2006). Berikut ini disajikan data mengenai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kalimantan Timur.

Gambar 1.1. Pengeluaran Pemerintah pada berbagai bidang

### APBD (dalam miliar rupiah)



Sumber: Pemprov Kaltim (2015)



Gambar 1.1 menjelaskan mengenai APBD pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp. 5,61 triliun. Pengeluaran pemerintah didistribusikan ke beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (infrastruktur), dan perencanaan pembangunan. Bidang perhubungan serta lingkungan hidup dan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, koperasi, penanaman modal serta pemuda dan olahraga, otonomi daerah, ketahanan dan kemandirian pangan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 295, 67 miliar yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun, pengembangan pendidikan formal, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp. 580,13 miliar dengan sasaran utama yaitu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada bidang infrastruktur, pihak pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,63 triliun.

Pengalokasikan sejumlah dana miliaran rupiah ke berbagai bidang khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang juga menjadi program prioritas pemerintah. Secara kuantitas, jumlah alokasi dana tersebut semakin besar setiap tahunnya, namun pada kenyataannya tujuan dari program tersebut dinilai belum efektif hal ini ditandai oleh tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur. Belanja modal seperti infrastruktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi output, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang esensial dalam aktivitas ekonomi.

Secara nominal, belanja daerah selalu mengalami peningkatan dan berfluktuatif akan tetapi bila dilihat secara rasional maka total belanja modal kabupaten/kota terhadap total PDRB nominal juga cenderung mengalami peningkatan dan bersifat fluktuatif. Dengan menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) dapat menghasilkan manfaat personal maupun sosial.

Penelitian Jamzani (2007) dengan menggunakan data panel 26 propinsi tahun 1993-2003 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian Abrar (2010) juga menunjukkan hasil serupa bahwa belanja pembangunan yang diproksi dengan belanja modal akan meningkatkan PDRB dan kecenderungan hubungan keduanya menunjukkan fungsi kuadrat.

Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dan peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan dan kesehatan, serta pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur (Loizides & Vamvoukas, 2005; dan Pirim, et al. 2014).

Faktor inflasi juga turut mempengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi di Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan nasional (BPS, 2014). Hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap produsen di Pulau Jawa dan Sulawesi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti beras dan bumbu-bumbuan (Lisý & Muchová, 2014; Chimobi, 2010). Selain angka pengangguran, tingkat inflasi di Kalimantan Timur masih lebih tinggi secara nasional.

Terdapat tiga kota besar di Kalimantan Timur yang memiliki tingkat inflasi tertinggi yaitu Kota Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan. Meningkatnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan berbagai harga komoditi seperti daging segar, bumbu-bumbuan, ikan segar, dan beberapa sayuran. Demikian pula dengan harga makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta harga perumahan yang meningkat.

Komponen lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran adalah investasi pemerintah dan investasi swasta, investasi pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara empiris,

keterkaitan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan studi Haider, et al. (2007) dan Ghani, & Din (2006) bahwa investasi publik maupun investasi swasta berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada data tabel 1.1 menunjukkan tingkat investasi tertinggi di Kalimantan Timur berada di tahun 2011. Investasi sebagian besar bergerak pada sektor perkebunan, tanaman pangan, pertambangan, listrik, gas dan air minum. Daerah potensial di Kalimantan Timur untuk investasi baik PMA maupun PMDN yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sebagai daerah perkebunan kelapa sawit dan investasi sektor lainnya. Demikian pula di Kota Balikpapan yang investasi asing didominasi oleh negara Mauritius, Singapura dan Korea Selatan.

Jhingan (1993) mengemukakan bahwa, investasi merupakan salah satu indikator yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi khususnya investasi swasta untuk berinvestasi. Ketimpangan wilayah dan penduduk erat kaitannya dengan sistem kapitalis karena kapitalis mementingkan profit atas investasinya dibandingkan dengan lainnya, dimana daerah yang lebih menguntungkan akan menarik investor masuk semakin banyak.

Dengan penanaman investasi yang besar harus pula didukung dengan produktivitas sumber daya manusia, untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia dari sudut pandang ekonomi ditentukan oleh tingkat produktivitasnya. Secara umum, produktivitas dapat terwujud dalam jumlah produksi yang sama



atau lebih besar dengan menggunakan sumber daya tertentu (Arabi, et al. 2013, dan Wilson & Briscoe, 2004).

Kualitas sumber daya manusia lebih spesifik kepada jumlah penduduk tamatan SMA ke atas (perguruan tinggi) dibagi dengan angkatan kerja. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi akan menjadikan pembangunan manusia semakin baik, begitu pula sebaliknya akibat dari perbaikan kualitas manusia tersebut dalam jangka panjang akan menjadikan kinerja perekonomian akan meningkat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perbaikan dari modal manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kinerja ekonomi. Dengan kata lain antara kinerja ekonomi dan dampaknya terhadap pembangunan manusia maupun sebaliknya merupakan kaitan yang cukup kuat. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi laju perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk. Berbagai fenomena dan isue terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Kalimantan Timur yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengkaji topik tentang "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dikemukakan dapat diwujudkan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Adapun pertanyaan penelitian adalah.

1. Apakah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran dan berpengaruh tidak langsung melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran dan berpengaruh tidak langsung melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah inflasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran dan berpengaruh tidak langsung melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan inflasi

terhadap investasi, SDM, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh inflasi terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai fundamental ekonomi makro di Provinsi Kalimantan Timur khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pihak terkait dalam menanggulangi masalah pengangguran di tingkat Provinsi.
3. Untuk memberikan dukungan empirik bagi penciptaan lapangan kerja kaitannya dengan faktor ekosgen berupa pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta berkaitan dengan inflasi.

4. Penelitian ini bermanfaat dalam merumuskan pola analisis pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan inflasi terhadap investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, sehingga memperkaya khasanah teori dalam kajian ekonomi pembangunan.
5. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan kajian terkait analisis determinan pengangguran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Telaah Teoritis tentang pengeluaran pemerintah

Teori Peacock dan Wiseman (Algifari, 1998) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Adanya peningkatan Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitupula pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Wagner (1883) mengemukakan suatu hukum mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase GNP. Di dalam Hukum Wegner tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengeluaran sektor publik meningkat. Menurut Adolf Wagner (Mursinto, 2005 dan Badrudin 2012). Pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. atau hukum selalu makin meningkatnya kegiatan negara atau pengeluaran negara.

Harrod-Domar memaparkan berbagai pengeluaran pemerintah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar mengkombinasikan kedua sisi baik sisi penawaran maupun sisi permintaan. Aspek utamanya adalah peranan investasi yang berdampak

positif melalui proses pengganda (*multiplier effects*) terhadap permintaan agregat maupun penawaran agregat melalui pengaruh dalam kapasitas produksi. Investasi dapat menambah kapasitas barang-barang modal dan untuk mempertinggi keseluruhan pengeluaran masyarakat. Dengan kata lain untuk menambah perbelanjaan *aggregate*.

Pengeluaran ini sangat penting terutama di daerah-daerah terkebelakang yang sangat minim infrastruktur untuk menarik minat pihak swasta berinvestasi. Pihak swasta tidak tertarik pada investasi ini, karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama (Brata, 2005). Dengan pertimbangan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup pembangunan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi, perencanaan dan implementasi perlu waktu yang panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu.

Barro (1991) menjelaskan dampak pengeluaran pemerintah yang produktif akan berkolerasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran yang tidak produktif akan berkolerasi negatif. Investasi produktif pemerintah yaitu infrastruktur, energi, telekomunikasi dan transportasi. Juga menurut Badrudin (2012), peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah yaitu belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ketersediaan infrastuktur akan membantu perusahaan-perusahaan yang berinvestasi untuk menurunkan biaya rata-rata penggunaan infrastruktur. Pada umumnya pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara pula. Suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Todaro, 2011). Adolf Wegner menyebut dengan *The Law of Ever Increasing State Activities*.

Pengeluaran pemerintah sebagai investasi pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembelian barang-barang publik untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Keynes (1936) bahwa investasi pemerintah merupakan pos pembiayaan pemerintah untuk membiayai fasilitas publik dalam berbagai kegiatan ekonomi akan memengaruhi permintaan agregat atas pembelian barang dan jasa sehingga pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran pembangunan dari sisi permintaan (*demand side*).

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, (Todaro, 2011) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti

misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas (*take off*), namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar.

Teori pertumbuhan Neo Klasik bahkan menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai investasi pemerintah yaitu belanja modal justru merupakan instrumen fiskal yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi terutama terhadap investasi swasta. Justru pemerintah akan melakukan pemborosan pengeluaran yang sangat besar di mana pihak swasta dapat melakukannya. Pengeluaran modal pemerintah diharapkan dapat diminimalkan dan diberi ruang lebih besar kepada pihak swasta dalam perekonomian.

Teori pertumbuhan Neo Klasik menyatakan bahwa meningkatkan belanja publik, terutama jika dibiayai oleh utang, menyebabkan investasi swasta lari keluar atau disebut (*crowding out effects*). Oleh karena semakin tinggi tingkat suku bunga akibat dampak ekspansi pengeluaran pemerintah. Neo Klasik berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, baik dibiayai dengan pajak atau utang, meningkatkan permintaan barang dan jasa akan menaikkan suku bunga untuk mencapai keseimbangan pada pasar modal, sehingga membuat modal lebih mahal dan dengan demikian mengurangi investasi (Ganelli, 2003; Kustepeli, 2005). Hal yang sama juga dikemukakan pada hasil penelitian Sinevičienė

(2014) bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap investasi swasta.

Pembangunan sarana publik seperti infrastruktur yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Pembiayaan fasilitas publik ini bersifat produktif dan menstimulasi untuk pengeluaran barang-barang lainnya. Manfaat pengeluaran belanja modal yaitu meningkatkan akselerasi pembangunan seperti untuk stimulus minat masuk para investor. Sebab asumsi rasional yang dilakukan oleh investor adalah memaksimalkan profit dengan meminimalkan biaya. Sehingga dengan ketersediaan infrastruktur yang baik diperkirakan akan mendatangkan keuntungan.

Dengan ketersediaan sarana infrastruktur yang baik di suatu daerah akan meningkatkan minat masuk para investor. Oleh karena dengan adanya fasilitas publik tersebut maka pihak investor bisa menekan banyak biaya untuk menyediakan sarana tersebut yang telah diambil alih oleh pemerintah. Dengan utilitas infrastruktur dapat menurunkan biaya produksi komersial, memperkecil biaya energi, transportasi dan komunikasi. Infrastruktur demikian mampu memperlancar mobilisasi ekonomi masyarakat menuju lokasi tujuan bisnis dan membuka akses di daerah-daerah yang mempunyai peluang dan keuntungan bisnis.

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang

lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Sedangkan pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran untuk kesejahteraan sosial masyarakat seperti program kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Keterlibatan dan peran pemerintah semakin lama semakin berkurang seiring dengan semakin meningkatnya tahapan yang dilalui.

## **2.2. Telaah Teoritis tentang inflasi**

Konsep tentang inflasi telah dijelaskan oleh berbagai teori, diantaranya adalah teori kuantitas yang merupakan teori yang paling tua mengenai inflasi, namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di jaman yang modern. Boediono (1998) memaparkan bahwa teori kuantitas ini menyoroti peranan dalam inflasi dari jumlah uang beredar dan psikologi masyarakat mengenai harga-harga.

Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun penyebab awal dari kenaikan harga-harga tersebut.



Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Ada beberapa kemungkinan keadaan, keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang.

Teori kuantitas uang (*monetarist model*) menyatakan bahwa kuantitas uang yang ada menentukan tingkatan harga yang berlaku, dan bahwa tingkat pertumbuhan kuantitas uang yang ada menentukan tingkat inflasi (Mankiw, 2007). Dalam menganalisis kerangka teori kuantitas uang (Nanga, 2001), kaum Klasik menggunakan persamaan pertukaran (*equation of exchange*)  $MV = PY$  sama dengan  $PY = MV$ . Bila jumlah uang bertambah lebih cepat (karena terlalu banyak uang beredar) dibandingkan volume transaksi/pertambahan barang, maka nilai uang akan merosot, dan ini berarti kenaikan harga. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan jumlah uang beredar dan jumlah kredit yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar.

Teori kuantitas kemudian dikritisi oleh teori Keynes mengenai inflasi yang didasari atas teori makro dan aspek-aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas

kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut *inflationary gap*).

*Inflationary gap* timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank.

Model inflasi Keynes, jumlah uang beredar bukanlah satu-satunya faktor penentu tingkat harga. Ada banyak faktor lain yang menurut Keynesian dapat mempengaruhi tingkat harga, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak (Nanga, 2001). Inflasi terjadi karena masyarakat

ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat).

Model ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment*. Menurut Keynes, kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah, maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, yang selanjutnya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Hal ini akan berpengaruh terhadap melambatnya atau bahkan berkurangnya pertambahan permintaan untuk investasi dan akan memperlemah tekanan inflasi.

Keynes memaparkan bahwa inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Menurut Jamli (2001), golongan non monetarist ini menambahkan bahwa peningkatan permintaan agregat dapat terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran konsumsi, peningkatan investasi swasta (karena suku bunga kredit murah), peningkatan pengeluaran pemerintah (yang dibiayai dengan pencetakan

uang baru), atau kenaikan ekspor neto (karena kenaikan permintaan luar negeri terhadap barang-barang ekspor).

Teori strukturalis juga membahas tentang mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran (*rigdities*) dari struktur perekonomian negara – negara sedang berkembang. Menurut Boediono (1998), karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang.

Teori ini menekankan pada ketegaran (infleksibilitas) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Melalui beberapa studi mengenai inflasi di negara berkembang, ditunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris.

Adanya goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*; utang luar negeri; dan nilai tukar valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.

Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan: a) teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang; b) terdapat asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya; c) faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan-keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri.

Nanga (2001) menyebutkan, bahwa terdapat tiga hal penting yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu: 1) Terdapat kecenderungan harga untuk meningkat; 2) Kenaikan harga berlangsung secara terus menerus; 3) Kenaikan harga bersifat umum, yaitu kenaikan harga terjadi tidak hanya pada satu atau beberapa komoditi namun pada harga barang secara umum. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

### **2.3. Telaah Teoritis tentang investasi**

Todaro (2000) menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang disebut sebagai investasi. Dengan demikian investasi dapat

diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal atau pembentukan modal.

Harrod-Domar (Subri, 2002) dalam teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar pula, dimana dalam kondisi seperti ini diasumsikan bahwa tenaga kerja meningkat secara geometris dan selalu *full employment*.

Ada beberapa bentuk pengeluaran investasi yakni investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang perusahaan beli untuk proses produksi, investasi residensial (*residential investment*) mencakup perumahan yang baru orang beli untuk ditinggali dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan, investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang diperusahaan ditempatkan di gudang, termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi dan barang jadi (Mankiw, 2000).

Menurut Tambunan (2001), didalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/ kapital tetap domestik (*domestic fixed capital*

formation). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi neto (pembentukan modal tetap domestik neto). Bertambahnya jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasikan.

Dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu dalam prakteknya yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran/pembelanjaan yang berikut: pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan; pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya; pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen yang membelanjakan bagian terbesar dari pendapatan mereka untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka, para pengusaha membeli barang-barang modal bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk digunakan bagi memperoleh keuntungan. Maka sampai dimana besarnya untung yang diharapkan akan diperoleh, besar sekali peranannya dalam



menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping oleh harapan masa depan untuk memperoleh untung, tingkat investasi ditentukan pula oleh beberapa faktor lain (Tambunan, 2001).

Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: tingkat bunga, ekspektasi tingkat return, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat laba perusahaan, situasi politik, kemajuan teknologi dan kemudahan-kemudahan dari pemerintah (Herlambang dkk, 2001). Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor).

Para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuntungan neto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar) yang diterima lebih besar dari tingkat bunga (Brata, 2005). Seorang investor mempunyai dua pilihan didalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito) dan menggunakannya untuk investasi (Brata, 2005).

Tingkat bunga kredit perbankan merupakan biaya oportunitas dalam pembentukan investasi oleh sektor bisnis, sehingga peningkatan tingkat bunga kredit perbankan akan menurunkan tingkat investasi dan kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi. Penurunan intensitas persaingan bank akan meningkatkan penawaran kredit perbankan atau

berasosiasi positif dengan struktur kredit perbankan (Reinikka & Svensson, 2000).

Peningkatan struktur kredit perbankan akibat penurunan intensitas persaingan bank akan meningkatkan investasi sektor riil dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ramalan mengenai keuntungan dimasa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain.

#### **2.4. Telaah Teoritis tentang kualitas sumber daya manusia**

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Hal ini hanya dimungkinkan melalui strategi pembangunan dengan adanya pemerataan kesempatan dan pemberdayaan manusia melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Pengembangan SDM ini sangat relevan dengan pendapat Ranis dan Stewart (2001) yang mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas sebagai upaya untuk menjadikan orang-orang dapat menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh.

Pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitasnya adalah tujuan utama dari pembangunan. Di mana manusia menjadi pusat

pembangunan yang dapat berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Perlunya manusia untuk memperoleh kebebasan dalam berbagai pilihan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan hidupnya baik yang lebih baik. Sejalan dengan pendapat Todaro (2011) bahwa di dalam pembangunan ada tiga komponen dasar atau nilai inti dari pembangunan yang paling hakiki yaitu: (1) Nilai kecukupan (*sustenance*) atas kebutuhan dasar manusia secara fisik. (2) Jati diri (*self-esteem*), untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa pantas dan layak untuk melakukan sesuatu dan lain-lain. (3) Kebebasan (*freedom*) dalam kehidupan ini.

Tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui pengembangan kecerdasan, teknologi, keterampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan (*sustainable*). Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas manusia melalui peningkatan aspek pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek tersebut sebagai wujud dari kualitas modal manusia, (Brata, 2005).

Peranan manusia dalam pembangunan sangat penting. Terlebih lagi dengan upaya pembangunan manusia yang telah memberikan sumbangan terbesar bagi pencapaian keberlangsungan pembangunan,. Dalam Teori Ekonomi Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menyatakan bahwa manusia adalah salah satu faktor produksi. Sebab

manusia dapat meningkatkan produktifitas output dalam perekonomian suatu negara.

Dalam melakukan percepatan pembangunan menurut pandangan aliran klasik melalui pendekatan orientasi developmentisme menyebutkan bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui proses pendidikan sangat penting. Karena dengan kualitas SDM akan meningkatkan produktifitas. Pandangan ini menyatakan bahwa kualitas SDM akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas.

Pengembangan modal manusia memiliki saling keterkaitan dengan kinerja ekonomi yang memiliki hubungan timbal balik (*reciprocity*). Pembangunan ekonomi merupakan kontribusi dari hasil pengembangan modal manusia. Sedangkan pengembangan modal manusia itu sendiri melalui pendidikan formal maupun informal, pelatihan dan pengalaman kerja, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat adalah tidak terlepas dari kontribusi hasil perbaikan kinerja ekonomi. Begitupun sebaliknya apabila keterbatasan sumber daya manusia akan menjadi faktor yang dapat menghambat pembangunan ekonomi tersebut.

Pengembangan SDM merupakan bentuk investasi yang disebut dengan investasi modal manusia (*human capital investement*). Konsep investasi tersebut merupakan gagasan awal dari Adam Smith, Heinrich Von Thunen dan aliran klasik lainnya sebelum abad ke-19. Kemudian

studi investasi modal manusia telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi dengan mengakuinya sebagai faktor penentu (*determinant*) dalam proses pembangunan. Alfred Marshall menyebutkannya bahwa "*the most valuable of all capital is that invested in human beings*" (Becker, 1975).

Dalam perspektif ekonomi, pengembangan kualitas SDM tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi sama seperti yang sebutkan oleh Schultz (1961). Kualitas SDM seperti tenaga kerja produktif merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Pada dekade 1960-an, para ekonom seperti Maddison dan Denison menemukan bahwa ada dua hal penting sebagai penentu kemajuan ekonomi yaitu faktor investasi modal manusia itu sendiri dan kemajuan teknologi. Demikian juga halnya dengan Robert M. Solow sebagai salah satu pelopor aliran neo klasik ekonomi menempatkan modal manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, (Jhingan, 2012).

Mankiw, Romer dan Weil menempatkan sumber daya manusia dan teknologi selain modal fisik sebagai agregat fungsi produksi yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam percepatan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh peranan tenaga kerja terdidik dan trampil. Perpaduan antara pendidikan dan investasi fisik lainnya yang sangat kuat akan memberikan kontribusi pada produktifitas. Investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya apabila digabungkan investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pengguna investasi fisik tersebut.

Kritikan terhadap penggunaan GNP sebagai tolak ukur pembangunan, dan dianggap bias karena menyisahkan sejumlah persoalan besar seperti tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, pelayanan publik yang masih buruk seperti pendidikan, standar kesehatan dan nutrisi, lingkungan hidup dan lain-lain. Sehingga, pada dekade tahun 1980-an muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs development*).

Pergeseran paradigma pembangunan ekonomi pada tahun 1970-an timbul menjadi perdebatan sengit antara kelompok "growth" dan kelompok "equity". Kelompok equity dengan mainstream dengan model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered*) dan pentingnya man investment melakukan kritik terhadap pembangunan yang terlalu GNP-oriented yang hanya menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan dan kemiskinan bagi negara-negara miskin.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (*human centered development*) muncul pada dekade tahun 1990-an. Manusia sebagai pusat pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, manusia diposisikan sebagai pelaku dalam melaksanakan akselerasi pembangunan. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, manusia diposisikan sebagai tujuan akhir untuk memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Fokus pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP maupun PRDB.

Pembangunan ekonomi tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga diukur dari perubahan lain dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Redefinisi pembangunan semakin menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fokus dan prioritas pembangunan.

## **2.5. Telaah Teoritis tentang pertumbuhan ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi menjadi perdebatan para ahli karena teori tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Dalam kajian teoritis tentang pertumbuhan ekonomi diuraikan berbagai perdebatan teoritis yang diawali dengan teori pertumbuhan klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan.

Teori ini menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang

menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan.

Teori pertumbuhan klasik memiliki banyak perbedaan dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Harrod di Inggris dan Domar di Amerika Serikat. Diantara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Damar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis).

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi: a) perekonomian bersifat tertutup; b) hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan; c) proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*); d) tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang.

Teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan neo klasik yang memiliki perbedaan utama dengan teori Harrod-Domar dan pertumbuhan klasik yaitu dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Solow, dan Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas kapital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori Neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan, terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik.

Hal khusus yang perlu dipahami yaitu model neoklasik mengasumsikan  $I=S$ . Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

Teori Schumpeter muncul sebagai salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengkritisi teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Teori Schumpeter menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwausaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usahayang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Maka menurut Schumpeter bahwa penanaman modal atau investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama, penanaman modal otonomi (*autonomous investment*) yakni penanaman modal untuk melakukan inovasi. Jenis investasi kedua, yaitu penanaman modal terpengaruh (*induced investment*) yakni penanaman modal yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi setelah munculnya inovasi tersebut.

Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationery state*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

Berbagai perdebatan teoritis antara para pakar maka dapat dirumuskan bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah

infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2002), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi : a) perekonomian bersifat tertutup; b) hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan; c) proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*); d) tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka

panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/ COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $y = C + I$ ).

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Solow dan Swan. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow, dan Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal, mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga

produktivitas kapital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori Neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar.

Terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Hal khusus yang perlu dicatat adalah bahwa model neoklasik mengasumsikan  $I=S$ . Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

Teori Schumpeter menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwausaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usahayang telah ada. Dengan pembukaan

usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Maka menurut Schumpeter penanaman modal atau investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama, penanaman modal otonomi (*autonomous investment*) yakni penanaman modal untuk melakukan inovasi. Jenis investasi kedua, yaitu penanaman modal terpengaruh (*induced investment*) yakni penanaman modal yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi setelah munculnya inovasi tersebut.

Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationery state*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai padatingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam

pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

## **2.6. Telaah Teoritis tentang pengangguran**

Keynesian merekomendasikan intervensi pemerintah dalam perekonomian yang mengklaim akan mengurangi pengangguran dan menekankan sifat siklus pengangguran. Teori ini berfokus pada berulangnya guncangan yang tiba-tiba mengurangi permintaan agregat terhadap barang dan jasa dan dengan demikian mengurangi permintaan untuk pekerja. Model Keynesian juga mengemukakan intervensi pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan permintaan untuk pekerja.

Model tersebut dapat mencakup rangsangan keuangan, penciptaan lapangan kerja yang dibiayai publik, dan kebijakan moneter ekspansionis. Keynes percaya bahwa akar penyebab pengangguran adalah keinginan investor untuk menerima lebih banyak uang daripada menghasilkan lebih banyak produk, yang tidak mungkin tanpa badan-badan publik menghasilkan uang baru.

Selain teori-teori komprehensif pengangguran, ada beberapa kategorisasi pengangguran yang digunakan untuk lebih tepatnya model dampak pengangguran dalam sistem ekonomi. Jenis utama dari pengangguran termasuk pengangguran struktural yang berfokus pada masalah struktural dalam perekonomian dan inefisiensi yang melekat

dalam pasar tenaga kerja, termasuk ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dengan keahlian yang diperlukan.

Pengangguran siklis, pengangguran struktural, dan pengangguran klasik. Namun, keberadaan pengangguran struktural mungkin mencerminkan pilihan yang dibuat oleh para penganggur di masa lalu, sementara klasik (natural) pengangguran dapat mengakibatkan dari pilihan legislatif dan ekonomi yang dibuat oleh serikat buruh atau partai politik. Jadi, perbedaan antara pengangguran sukarela dan tidak sukarela sulit untuk dibedakan.

Marxis juga berbagi pandangan Keynesian hubungan antara permintaan ekonomi dan lapangan kerja, tetapi dengan peringatan bahwa kecenderungan sistem pasar untuk memangkas upah dan mengurangi partisipasi tenaga kerja pada tingkat perusahaan menyebabkan penurunan yang diperlukan dalam permintaan agregat dalam perekonomian secara keseluruhan, menyebabkan krisis pengangguran dan periode kegiatan ekonomi yang rendah sebelum akumulasi modal (investasi) fase pertumbuhan ekonomi dapat terus.

Karl Marx menjelaskan bahwa pengangguran melekat dalam sistem kapitalis tidak stabil dan krisis periodik pengangguran masal yang harus diharapkan. Fungsi dari proletariat dalam sistem kapitalis adalah untuk memberikan "tentara cadangan tenaga kerja" yang menciptakan tekanan pada upah. Hal ini dilakukan dengan membagi kaum proletar menjadi surplus tenaga kerja (karyawan) dan di bawah (menganggur). Menurut

dalam pasar tenaga kerja, termasuk ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dengan keahlian yang diperlukan.

Pengangguran siklis, pengangguran struktural, dan pengangguran klasik. Namun, keberadaan pengangguran struktural mungkin mencerminkan pilihan yang dibuat oleh para penganggur di masa lalu, sementara klasik (natural) pengangguran dapat mengakibatkan dari pilihan legislatif dan ekonomi yang dibuat oleh serikat buruh atau partai politik. Jadi, perbedaan antara pengangguran sukarela dan tidak sukarela sulit untuk dibedakan.

Marxis juga berbagi pandangan Keynesian hubungan antara permintaan ekonomi dan lapangan kerja, tetapi dengan peringatan bahwa kecenderungan sistem pasar untuk memangkas upah dan mengurangi partisipasi tenaga kerja pada tingkat perusahaan menyebabkan penurunan yang diperlukan dalam permintaan agregat dalam perekonomian secara keseluruhan, menyebabkan krisis pengangguran dan periode kegiatan ekonomi yang rendah sebelum akumulasi modal (investasi) fase pertumbuhan ekonomi dapat terus.

Karl Marx menjelaskan bahwa pengangguran melekat dalam sistem kapitalis tidak stabil dan krisis periodik pengangguran masal yang harus diharapkan. Fungsi dari proletariat dalam sistem kapitalis adalah untuk memberikan "tentara cadangan tenaga kerja" yang menciptakan tekanan pada upah. Hal ini dilakukan dengan membagi kaum proletar menjadi surplus tenaga kerja (karyawan) dan di bawah (menganggur). Menurut

Marx, satu-satunya cara untuk menghilangkan pengangguran secara permanen akan menghapus kapitalisme dan sistem kompetisi dipaksa untuk upah dan kemudian beralih ke sistem ekonomi sosialis atau komunis.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketidadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dampak jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan

lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa; (a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*) dan, (b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand of labor*)

Terdapat dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer Koran. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalisme modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalisme modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi "terlalu banyak".

Kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini bukan hanya karena tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga karena pekerjaan. Pendapat ini selanjutnya akan dapat menimbulkan pasar dan inilah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tenaga kerja mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai sumber daya untuk melaksanakan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, Kedua sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut merupakan dua syarat yang sama mutlaknya untuk pertumbuhan di wilayah ini.



Dalam teori ekonomi makro sering digunakan model siklus rumah tangga dan perusahaan untuk menjelaskan proses ekonomi dalam masyarakat. Untuk menyederhanakan analisa, masyarakat hanya terdiri dari dua pihak yaitu rumah tangga dan perusahaan. Untuk menjalankan produksi barang dan jasa, perusahaan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga dan sebaliknya sebagai imbalannya perusahaan memberikan pendapatan dalam bentuk upah. Demikian lahirlah pasar kerja dan jasa.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa apabila terjadi gangguan dalam siklus ini akan terjadi stagnasi dalam perekonomian. Dalam pembangunan kita berusaha mempercepat dan memperbesar arus tersebut, meningkatkan mutu barang dan jasa yang dihasilkan serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang harus melaksanakan proses produksi.

Dari dua rumah tangga yaitu rumah tangga konsumen dan produsen akan melahirkan pasar barang dan pasar tenaga kerja. Kedua pasar yang terakhir ini tidak dapat ditinggalkan dalam pembangunan, bukan hanya karena tenaga kerja diperlukan dalam proses produksi disamping sumber-sumber lain, akan tetapi perlu pula karena tenaga kerja sebagai penghasil pendapatan dan daya beli bagi keluarganya dan masyarakat yang dapat menimbulkan pasar barang.

Dalam rangka menuju perluasan kesempatan kerja tersebut maka berbagai upaya perlu dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan

pembangunan daerah ini. Misalnya dengan penerapan teknologi yang sesuai dengan kriteria a) mampu memperluas kesempatan kerja, kesempatan untuk berusaha serta meningkatkan penghasilan; b) mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia, menggalakan inovasi dan kreativitas; c) dapat dikelola oleh masyarakat setempat; d) selaras dengan politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan setempat.

Dengan penciptaan kesempatan kerja bukan hanya sekedar menciptakan kesempatan kerja pada khususnya, tetapi sekaligus juga meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bekerja lebih produktif menciptakan nilai tambah dan menjamin produksi yang lebih baik dengan menggunakan teknologi tepat guna. Dalam hubungannya dengan perluasan kesempatan kerja beberapa hal; yang perlu diperhatikan a) peningkatan produksi melalui proyek-proyek pembangunan. Baik secara langsung maupun tidak langsung harus memberikan dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja; b) pola investasi harus lebih memprioritaskan pada penciptaan kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **2.7. Keterkaitan teori dan kajian empiris antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi**

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan (Mangkoesoebroto, 1993), yaitu golongan pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan

oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana pendidikan dan kesehatan. Pada tahap ini pemerintah tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar (Rostow & Musgrave, 1996).

Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1993).

Pada golongan kedua, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Wagner mengemukakan suatu teori mengenai

perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, yaitu: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Wagner, 1883).

Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Wagner, 1883).

Selanjutnya pada golongan ketiga, teori Peacock dan Wiseman. Peacock dan Wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbalik. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara (Mangkoesebroto, 1993).

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak

yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Asumsi yang digunakan dalam teori *human capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori *human capital* dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Mankiw, 2008).

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan

merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Pendidikan menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Sitepu dan Sinaga (2005) dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang.

Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, oleh karena itu perhatian yang besar untuk bidang pendidikan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di suatu daerah atau negara.

Menurut Todaro dan Smith (2006) kesehatan dan pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar, untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna dari pembangunan. Terlebih lagi bagi kelompok masyarakat miskin yang

umumnya tidak punya sumber daya kecuali modal tenaga maka kesehatan menjadi kebutuhan yang paling esensial.

Tenaga kerja miskin yang tidak sehat tidak akan mampu bekerja maksimal sehingga produktivitasnya akan rendah, dan pendapatannya juga rendah. Demikian pula kondisi kesehatan yang buruk terutama pada ibu dan anak akan mencipkakan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Anak-anak yang kurang sehat akan mengalami gangguan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan pun akan mengalami penurunan.

Menurut Wahyudi (2011) perhatian belanja demi peningkatan pelayanan di bidang kesehatan sangat diperlukan karena dapat membantu dalam pengurangan kemiskinan mengingat adanya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan status kesehatan. Tingkat kesehatan yang lebih baik akan memperbesar pendapatan melalui peningkatan produktivitas, sementara pertumbuhan ekonomi akan memperkuat pembentukan modal manusia (*human capital*) dan perbaikan status kesehatan.

Pada suatu daerah di mana tingkat kesempatan kerjanya tinggi, sudah barang tentu akan mengurangi tingkat pengangguran dan sebaliknya jika kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat. Tinggi rendahnya tingkat kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa komponen pokok, komponen tersebut di suatu negara jenisnya berbeda-beda.

Menurut Simanjuntak (2001) faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu: Pertama (1), kondisi perekonomian. Pesatnya roda perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi, kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja. Jadi banyak perusahaan yang menambah tenaga kerja baru. Kedua (2), pertumbuhan penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu semakin tinggi jumlah penduduk akan mengurangi kesempatan orang untuk bekerja. Ketiga (3), produktivitas/kualitas sumber daya manusia.

Tingginya produktivitas dan kualitas sumber daya seseorang akan mendorong tingginya tingkat kesempatan kerja, dan sebaliknya kualitas sumber daya manusia yang rendah akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Keempat (4) tingkat upah. Kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas produksi akan menyebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya, hal tersebut akan menurunkan tingkat kesempatan kerja. Kelima (5), struktur umur penduduk. Semakin besar struktur umur penduduk yang digolongkan mudah, maka kesempatan kerja akan menurun dan sebaliknya.

Dengan demikian dengan adanya investasi-investasi baru (Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan) memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap

faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran dan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja lahir karena investasi (Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan) dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi (Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan), penambahan penduduk dan angkatan kerja.

**2.8. Keterkaitan teori dan kajian empiris antara pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi**

Infrastruktur merupakan salah satu peranan penting dalam tingkat kemiskinan. Dimana infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih,

sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memicu investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Infrastruktur yang baik juga merangsang peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang semakin meningkatkan mendorong mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur ini akan mempercepat pembangunan ekonomi.

Meningkatnya kondisi pembangunan daerah dapat berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan disisi lain dapat mengentaskan kemiskinan. Kondisi tersebut menjadikan kajian tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dianggap sangat urgen. Peran pemerintah dalam suatu negara sangat menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membuat masyarakatnya menjadi miskin ataupun keluar dari kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi lebih banyak dan lebih dalam jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat dan tidak berpihak kepada masyarakat.

Usmaliadanti (2011) mengemukakan bahwa dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah

dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesoebroto, 1993).

Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini: (a) perubahan permintaan akan barang publik; (b) perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi; (c) perubahan kualitas barang publik, (d) perubahan harga faktor-faktor produksi.

Dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara, peranan pemerintah secara empiris tidak dapat dihindarkan. Peran pemerintah tersebut diwujudkan dalam kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki dua instrumen pokok, yaitu: perpajakan (*tax policy*) dan

pengeluaran (*expenditure policy*). Dalam hal pembangunan ekonomi rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi seperti pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilitas ekonomi tetapi juga peningkatan harkat sosial seperti pemerataan, pendidikan dan kesehatan.

Investasi merupakan diantara faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta. Korelasi positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori Harrod Domar (dikemukakan oleh Evsey domar dan R.F. Harrod) mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 1997).

Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa: 1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barangbarang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. 2) Dalam perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan, berarti sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan

besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). 4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal dan output (*Capital Output Ratio*) dan ratio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Untuk meningkatkan output dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, melalui penambahan investasi guna memperbaharui teknologi yang digunakan dan / atau investasi guna meningkatkan kemampuan SDM (*human capital*). Dengan demikian akan meningkat rasio kapital-tenaga kerjanya. Dengan meningkatnya rasio antara kapital-tenaga kerja secara konsisten diharapkan akan meningkatkan PDRB (Pancawati, 2000).

Investasi swasta atau PMDN *bruto* merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil, dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian. Besarnya investasi perusahaan dapat diterangkan dalam analisis hubungannya dengan tingkat suku bunga, apabila suku bunga rendah lebih banyak investasi yang akan dilakukan, dan sebaliknya kenaikan suku bunga akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah investasi (Sukirno, 2000). Akhirnya kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat.



## 2.9. Keterkaitan teori dan kajian empiris antara inflasi terhadap pengangguran melalui investasi kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi

Apabila tingkat pengangguran rendah, masalah inflasi akan dihadapi. Makin rendah tingkat pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi. Sebaliknya apabila terdapat masalah pengangguran yang serius, tingkat harga-harga adalah relatif stabil. Berarti tidak mudah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan kestabilan harga secara serentak (Sukirno, 2000).

Hasil studi Phillips, (1958) terdapat hubungan negative antara persentase kenaikan upah dengan pengangguran. Kurva Phillips juga digunakan untuk menggambarkan hubungan diantara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Hal ini berarti sifat berkaitan diantara inflasi harga dan tingkat pengangguran tidak berbeda dengan sifat hubungan diantara inflasi upah dan tingkat pengangguran. Pada saat pengangguran tinggi, kenaikan harga-harga relatif lambat, akan tetapi makin rendah pengangguran, makin tinggi tingkat inflasi yang berlaku.

Dalam pasar tenaga kerja, tingkat upah cenderung turun apabila terdapat pengangguran (kelebihan tenaga kerja), dan akan naik apabila terdapat kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Dengan demikian apabila dalam pasar terdapat kelebihan penawaran, hal ini akan tercermin dari banyaknya orang yang mencari pekerjaan (Nopirin, 1987). Natural rate of unemployment digambarkan sebagai perpotongan antara kurva

Philips dengan sumbu horizontal. Maknanya, pada titik tersebut tingkat pengangguran berada dalam situasi kestabilan upah.

Analisis Lipsey mengenai kurva Philips dengan menggunakan teori pasar tenaga kerja menentukan tingkat upah, kedua tingkat/laju perubahan tingkat upah ditentukan oleh besarnya kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Tingkat perubahan upah mempunyai hubungan searah dengan kelebihan permintaan. Makin besar kelebihan permintaan akan tenaga kerja tingkat perubahan upah juga makin besar. Sedangkan kelebihan permintaan mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran. Makin besar kelebihan permintaan akan tenaga kerja, pengangguran cenderung makin kecil.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum okun, Arthur Okun sebagai ekonom pertama yang mempelajarinya (Demburg, 1985). Adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan *output* dalam siklus bisnis. Hasil penelitiannya bahwa penambahan satu poin pengangguran akan mengurangi GDP sebesar dua persen. Terdapat pengaruh yang negative antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan pengangguran memperlihatkan ketidakmerataan, sehingga berdampak pada konsekuensi distribusional.

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi,

sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar harapan untuk membuka kapasitas produksi baru sehingga akan menyerap tenaga kerja baru.

## 2.10. Penelitian Empiris

Wang (2005) mengemukakan pengeluaran pemerintah Kanada untuk pendidikan dan kesehatan memiliki efek positif sedangkan pengeluaran pemerintah pada modal dan infrastruktur memiliki efek negatif pada investasi swasta. Pengeluaran pemerintah dan pelayanan sosial tidak memiliki efek yang signifikan pada investasi swasta. Njuru, et al. (2014) menjelaskan temuan penelitian bahwa pengeluaran pemerintah Kenya secara berulang-ulang memiliki keterkaitan kuat dengan investasi swasta.

Basar, et al. (2011) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah Turki dan total transfer pembayaran memiliki efek positif pada investasi swasta. PDB dan suku bunga memiliki efek positif dan negatif terhadap investasi swasta. Royal, (2008), pengeluaran pemerintah Australia sektor pendidikan dan kesehatan berpotensi menciptakan proses yang lebih transparan bagi semua pemangku kepentingan dalam proses investasi. Ifeakachukwu, et al. (2013) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan komponen belanja publik Nigeria memiliki dampak yang berbeda terhadap investasi swasta kedua dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Studi yang dilakukan Oluwatobi, et al. (2011) mendapatkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah berulang pada pengembangan sumber daya manusia dan tingkat output riil, sementara belanja modal berhubungan negatif dengan tingkat output riil. Razmi, (2012) menjelaskan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran kesehatan pemerintah dan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian Prasetyo & Zuhdi, (2013) menjelaskan adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Gurpur & Rautdesai, (2014) meneliti tentang seberapa jauh pembentukan pembangunan manusia yang ideal di Asia Selatan. Kurt (2015), dampak langsung dari pengeluaran kesehatan pemerintah Turki pada pertumbuhan ekonomi di Turki adalah positif dan signifikan dan dampaknya tidak langsung adalah negatif dan signifikan. Chude dan Chude (2013) menjelaskan jumlah pengeluaran pendidikan sangat dan signifikan secara statistik dan memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria dalam jangka panjang.

Loizides & Vamvoukas (2005), ukuran pemerintah Inggris menyebabkan pertumbuhan ekonomi di semua negara yang menjadi sampel penelitian baik jangka pendek dan jangka panjang di Irlandia dan Inggris; ii) pertumbuhan ekonomi Granger menyebabkan peningkatan ukuran relatif pemerintahan di Yunani. Temuan Mekdad et al (2014)

bahwa pengeluaran publik Aljazair untuk pendidikan mempengaruhi pertumbuhan positif ekonomi di Aljazair.

Pirim, et al. (2014) menemukan bahwa dalam jangka panjang, investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan bisa memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Mihaiu, et al. (2013) menjelaskan bahwa Bulgaria mengalokasikan 4,7% dari PDB pengeluaran publik atas investasi pada tahun 2010. Basar, et al. (2011) mengemukakan bahwa PDB dan suku bunga memiliki efek positif dan negatif terhadap investasi swasta. Bello, et al. (2012) dampak sebenarnya dari pengeluaran pemerintah pada investasi sektor swasta bervariasi tergantung pertimbangan pada jenis belanja pemerintah.

Gupta, et al. (1998) dalam hasil penelitiannya menunjukkan peningkatan belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan di negara-negara dengan program yang didukung IMF telah sebanding dan kadang-kadang lebih besar daripada di negara-negara lain, namun porsi yang cukup besar dari belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan dikhususkan untuk pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan kuratif. Oluwatobi, et al. (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah berulang pada pengembangan sumber daya manusia dan tingkat output riil, sementara belanja modal berhubungan negatif dengan tingkat output riil.

Temuan Alshahrani, et al. (2014) bahwa implikasi kebijakan bagi para pembuat kebijakan Saudi pada memaksimalkan keuntungan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Loizides & Vamvoukas (2005) bahwa pertumbuhan ekonomi Granger menyebabkan peningkatan ukuran relatif pemerintah di Yunani. Chude & Chude (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jelas dipengaruhi oleh faktor-faktor eksogen kedua dan endogen dengan pengeluaran publik di Nigeria.

Al-Saraireh (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh koefisien korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pengangguran dan tenaga kerja migrasi, dan koefisien korelasi signifikan positif dengan pengeluaran pemerintah. Hasil lainnya adalah hubungan yang signifikan antara prediksi pengangguran sebagai variabel dan pemerintah tingkat pengeluaran bergantung sebagai variabel penjelas. Nwosa (2014) mengemukakan pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran sementara itu memiliki dampak negatif dan tidak signifikan pada tingkat kemiskinan.

Onwe & Olarenwaju, (2014) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan dampak inflasi jangka panjang terhadap investasi perusahaan di Afrika Barat Moneter berada pada zona positif, kecuali Nigeria. Valadkhani, (2004) menemukan bahwa peningkatan satu persen inflasi dalam jangka panjang dapat menghasilkan satu persen penurunan dalam investasi dalam jangka pendek. Kasidi & Mwakanemela, (2013),

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Umaru & Zubairu (2012) menjelaskan bahwa semua variabel dalam model dan hasil kausalitas menunjukkan bahwa PDB mempengaruhi inflasi. Katria, et al. (2012) menemukan hubungan negatif dan signifikan antara inflasi dan tingkat pengangguran di negara-negara SAARC. Lisý & Muchová, (2014) menjelaskan Inflasi dan pengangguran memiliki kriteria konvergensi yang relevan untuk kesuksesan serikat moneter. Todorova, (2012) menemukan bahwa dinamika antara inflasi dan pengangguran bahwa jalan waktu keduanya menunjukkan fluktuasi.

Haider, et al. (2007) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa kausalitas dua arah antara investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Hashmi, et al. (2012) mengungkapkan hasil temuannya bahwa investasi publik maupun swasta menunjukkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Terdapat perbedaan substansial dalam dampak investasi sektor swasta dan publik pada pertumbuhan, dengan investasi swasta memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada investasi publik, terutama selama tahun 1980-an.

Mucuk dan Demirsel (2013), investasi asing langsung dan pengangguran bergerak bersama-sama dalam jangka panjang tetapi meskipun investasi asing langsung meningkatkan pengangguran di Turki dan Argentina. Zeb et al (2014) Penanaman Modal Asing memainkan peran penting dalam pengurangan pengangguran di Pakistan. Bayar

(2014), terdapat hubungan panjang antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ekspor dan arus masuk investasi langsung asing.

Arabi, et al. (2013) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan memiliki peran penentu dalam pertumbuhan ekonomi, faktor kualitas kesehatan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Wilson & Briscoe, (2004) menjelaskan terdapat hubungan kuantitatif antara investasi dalam pendidikan dan pelatihan dan tingkat dan pertumbuhan PDB per kapita di tingkat nasional. Ranis, (2004) peningkatan pendapatan akan meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pembangunan manusia.

Nistor (2007) menjelaskan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diterapkan investasi modal manusia sebagai kebijakan di tingkat kabupaten dapat menurunkan tingkat pengangguran regional. Özel, et al. (2013) dalam temuannya mengungkapkan bahwa variabel produktivitas dan pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang signifikan dan kuat pada pengurangan pengangguran.

Herman (2011), menemukan adanya dampak elastisitas tenaga kerja rendah dari pertumbuhan ekonomi. Birchenall, (2002) menjelaskan bahwa pekerja dengan tingkat keterampilan yang rendah tidak dapat memberikan cukup *output* untuk menutupi biaya kesempatan modal. Neto & Silva (2013) menguraikan temuannya berupa korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, hubungan positif antara

pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, dan hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

### BAB III

## KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

### 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Pada bagian ini disajikan mengenai hubungan antar variabel eksogen dan endogen yang dikaitkan dengan berbagai riset terdahulu dan kajian teori yang menguatkan *standing position* antara variabel, sehingga pada didapatkan suatu model penelitian yang menghubungkan antara variabel eksogen (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, inflasi) dan endogen (investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran) sebagai berikut.

Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini dipertegas pula oleh Wang (2005), Njuru, et al. (2014), Basar, et al. (2011), Royal (2008) dan Ifeakachukwu, et al. (2013) yang menjelaskan pengeluaran pemerintah secara berulang-ulang memiliki keterkaitan kuat dengan investasi.

Perkembangan fungsi-fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya pemerintah provinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara

sistematis menurut kebutuhannya. Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran.

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu hal yang sangat penting yaitu pertama untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Kedua, merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Ketiga, memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang (Kunarjo, 2002).

Perkembangan daerah dewasa ini masih menghadapi kendala berupa masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional, masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah

itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan yang efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis.

Kuncoro (2004) menjelaskan sasaran penyusunan fundamental ekonomi daerah bahwa dalam menyusun fundamental ekonomi diperlukan identifikasi sasaran penyusunan fundamental ekonomi daerah. Ada beberapa sasaran fundamental pembangunan yang berusaha dicapai oleh banyak daerah yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan infrastruktur dalam pembangunan. Berkurangnya kualitas pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru telah menghambat pembangunan nasional (Kuncoro, 2004).

Temuan penelitian Alshahrani, et al. (2014), Loizides & Vamvoukas, (2005), dan Chude & Chude (2013) bahwa infrastruktur berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Arabi, et al. (2013), Wilson & Briscoe (2004), dan Ranis (2004) mengaitkan antara kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Uraian tersebut menghasilkan preposisi hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah terhadap investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

Investasi secara empiris juga ditentukan oleh tingkat inflasi (Onwe & Olarenwaju, 2014; dan Valadkhani, 2004), inflasi yang diukur menggunakan IHK (indeks harga konsumen) menunjukkan perubahan harga barang atau jasa pada periode tertentu. Perubahan IHK mengindikasikan perubahan harga, sehingga ketika harga barang atau jasa mengalami kenaikan maka telah terjadi inflasi. Kondisi ekonomi dikatakan mengalami *excess demand* jika permintaan agregat tumbuh melebihi penawaran agregat. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan inflasi. Sebaliknya, bila permintaan agregat tumbuh di bawah pertumbuhan penawaran agregat, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat yang segera diikuti oleh penurunan inflasi (Kasidi & Mwakanemela, 2013; dan Umaru & Zubairu, 2012).

Beberapa variabel yang bisa digunakan sebagai proksi dari *excess demand* diantaranya adalah output gap, yaitu rasio antara *output actual* dengan *potensial output riil*. Selain itu, bisa juga digunakan *unemployment gap*, yaitu selisih antara tingkat pengangguran aktual dengan tingkat naturalnya. Alternatif lain adalah tingkat penggunaan kapasitas terpasang (*capacity utilization*). Penawaran agregat akan cenderung terus naik sejalan dengan kenaikan jumlah tenaga kerja, kapital, dan penguasaan teknologi. Dalam jangka panjang, output diyakini tumbuh secara konstan.

Tingkat harga ekuilibrium dalam perekonomian terjadi pada titik perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Perpotongan antara dua kurva ini berhubungan dengan

keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang. Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat disebut inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Sementara inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya atau penawaran agregat disebut inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*). Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi kenaikan harga (ekspektasi inflasi).

Pada arus kebijakan moneter, dapat diketahui bahwa inflasi dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam besaran uang beredar dengan arah yang sama, tingkat bunga dengan arah yang berlawanan, dan pendapatan nasional (Y) dengan arah yang sama. Oleh karena itu pula dapat dikatakan bahwa pengendalian inflasi dari sisi kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengendalikan ketiga variabel tersebut. Walau demikian, tetap harus disadari bahwa dalam perekonomian yang semakin terbuka, ketiga variabel tersebut tidak sepenuhnya dalam kendali otoritas moneter.

Inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (*over heated*), artinya kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya yang mengakibatkan harga cenderung mengalami kenaikan. Kondisi ekonomi yang *over heated* tersebut juga akan menurunkan daya beli uang (*purchasing power of money*) dan mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya (Tandelilin, 2001).

Onwe & Olarenwaju (2014), dan Valadkhani (2004) mengungkapkan dampak inflasi jangka panjang terhadap investasi. Ekspektasi (harapan) mengenai keuntungan dimasa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan dimasa depan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, *total agregat demand* meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (Bank Indonesia, 2007).

Melalui tambahan investasi yang ditanamkan diberbagai sektor yang menyebabkan ekonomi semakin tumbuh dan berkembang dengan indikatornya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pendapatan yang merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan (Ledyeva, 2006). Investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena terjadi perluasan produksi dan permintaan yang berdampak tidak hanya pada bidang ekonomi saja akan tetapi telah meluas pada bidang-bidang sosial kemasyarakatan (Manurung, 2009).

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada

tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Basri, 2002).

Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat

dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah, sehingga tingkat pengangguran semakin bertambah (Özel, et al., 2013; Birchenall, 2002; dan Neto & Silva, 2013).

Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

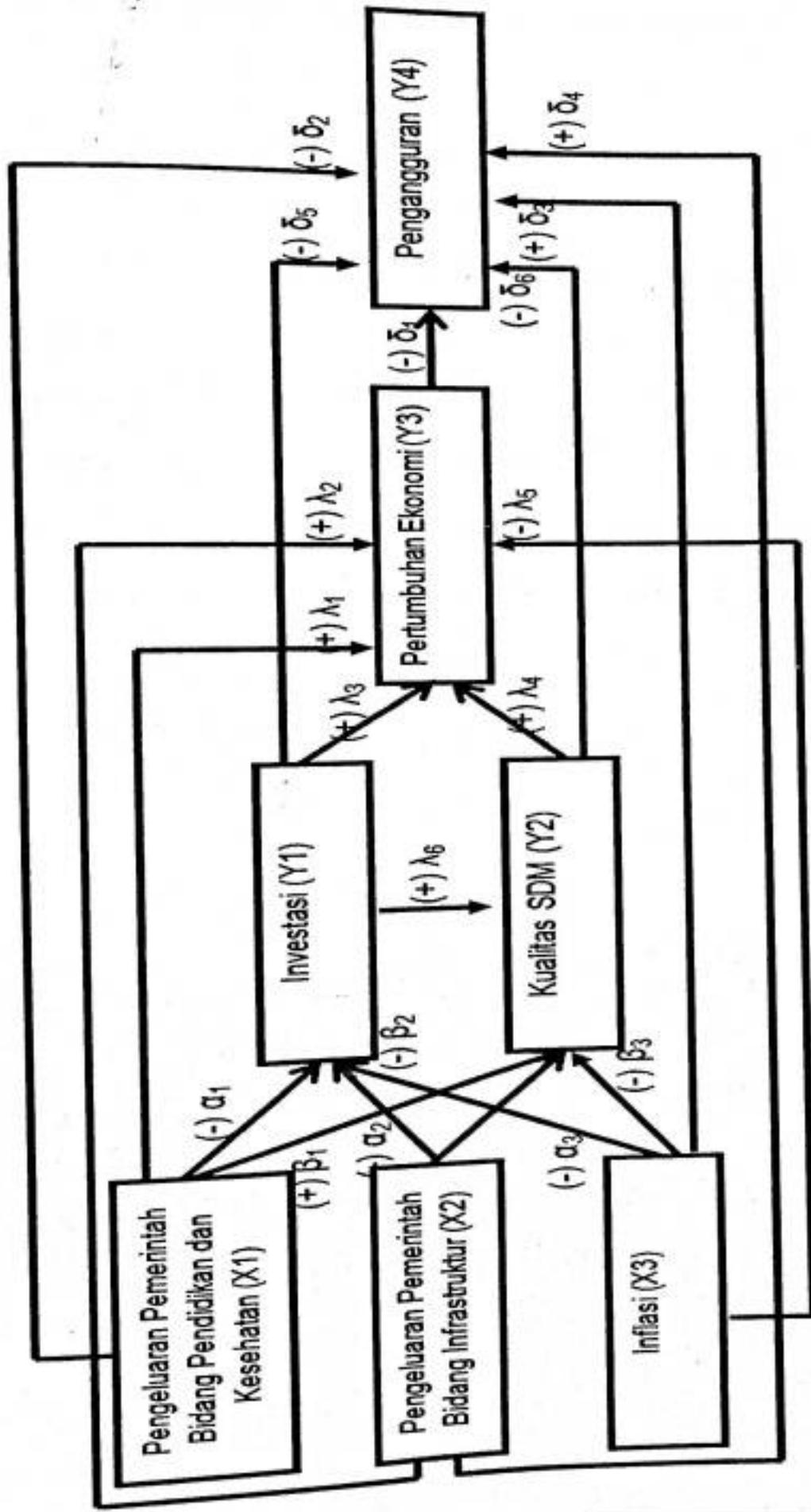
Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan

politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

Kurva Philips menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran yang didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (Mankiw, 2000). Uraian tersebut menghasilkan preposisi hubungan antara variabel inflasi terhadap investasi, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

*Novelty* (kebaharuan) penelitian ini dapat diidentifikasi pada variabel kualitas sumber daya manusia sebagai variabel intervening (endogen) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Arabi, et al. 2013; dan Wilson & Briscoe, 2004) dan pengangguran (Nistor, 2007), sedangkan pada umumnya penelitian lainnya menggunakan IPM (indeks pembangunan manusia) sebagai faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran (Boozet et al, 2003; dan Ranis, 2004). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 3.1  
Kerangka pikir Penelitian



### **3.2. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang diteliti maka dapat disusun hipotesis dibawah ini:

- 1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Inflasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pengangguran melalui investasi kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

## BAB IV METODE PENELITIAN



### 4.1. Rancangan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai serta sekaligus menguji hipotesis, maka rancangan penelitian yang digunakan adalah teknik kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian untuk mengetahui dan penjelasan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Selain itu juga penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena memberikan penjelasan deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini akan dianalisis variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, inflasi, investasi, kualitas SDM, terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Propinsi Kalimantan Timur.

### 4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Anto Dajan (1991) yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Definisi lain dari data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor lain:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa terbitan.
2. Badan Pusat Statistik kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa terbitan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur
5. Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian.

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder dari 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008-2014. Data sekunder ini dikumpulkan melalui identifikasi informasi spesifik yang diperoleh terkait dengan variabel-variabel penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang obyektif. Data dalam penelitian ini adalah kombinasi antara time series data dan *cross section* yang disebut dengan data panel data atau *pooled data* (Gujarati, 2003). Dengan rentang waktu tahun 2008-2014.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah human capital, belanja modal, inflasi variable eksogen, adapun variabel endogen yaitu investasi, SDM, terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Variabel ini dipilih karena untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah atau provinsi.

#### 4.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar (Suharsimi Arikunto, 2002). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Studi pustaka merupakan teknik analisis untuk informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian.

#### 4.4. Metode dan Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data atau *pooled data*, atau kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* dalam penelitian ini adalah waktu pengamatan penelitian dari tahun 2008 – 2014 yaitu 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan model fungsional antar variabel yang dianalisis dengan menggunakan model *structural* yang mengacu pada model persamaan *reduced form*, maka sistem persamaan simultan dapat dibentuk persamaan-persamaan estimasi sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_2, X_3) \quad (4.1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, X_3, Y_1) \quad (4.2)$$

$$Y_3 = f(X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2) \quad (4.3)$$

$$Y_4 = f(X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3) \quad (4.3)$$

Berdasarkan fungsi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} X_3^{\alpha_3} e^{\mu_1} \quad (4.1.a)$$

$$eY_2 = \beta_0 Y_1^{\beta_1} X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} X_3^{\beta_4} e^{\mu_2} \quad (4.2.a)$$

$$eY_3 = \lambda_0 Y_1^{\lambda_1} X_1^{\lambda_3} X_2^{\lambda_4} X_3^{\lambda_5} e^{\lambda_2 Y_2 + \mu_3} \quad (4.3.a)$$

$$eY_4 = \delta_0 Y_1^{\delta_1} X_1^{\delta_4} X_2^{\delta_5} X_3^{\delta_6} e^{\delta_2 Y_2 + \delta_3 Y_3 + \mu_4} \quad (4.4.a)$$

Persamaan 4.1.a; 4.2.a; 4.3.a; dan 4.4.a ditulis secara linear sehingga

$$\ln Y_1 = \ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1 \quad (4.1.b)$$

$$Y_2 = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln Y_1 + \beta_2 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_2 + \beta_4 X_3 + \mu_2 \quad (4.2.b)$$

$$Y_3 = \ln \lambda_0 + \lambda_1 \ln Y_1 + \lambda_3 \ln X_1 + \lambda_4 \ln X_2 + \lambda_5 X_3 + \lambda_2 Y_2 + \mu_3 \quad (4.3.b)$$

$$\ln Y_4 = \ln \delta_0 + \delta_1 \ln Y_1 + \delta_4 \ln X_1 + \delta_5 \ln X_2 + \delta_6 X_3 + \delta_2 Y_2 + \delta_3 Y_3 + \mu_4 \quad (4.4.b)$$

Persamaan 4.1.b ke persamaan 4.2.b :

$$Y_2 = \alpha_0 \ln \beta_0 + \beta_1 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1) + \beta_2 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_2 + \beta_4 X_3 + \mu_2$$

$$Y_2 = \alpha_0 \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 \ln X_1 + \beta_1 \alpha_2 \ln X_2 + \beta_2 \alpha_3 X_3 + \beta_3 \ln X_1 + \beta_4 \ln X_2 + \beta_5 X_3 + \mu_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = \alpha_0 \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \alpha_0 + (\beta_1 \alpha_1 + \beta_2) \ln X_1 + (\beta_1 \alpha_2 + \beta_3) \ln X_2 + (\beta_1 \alpha_3 + \beta_4) X_3 + \mu_1 + \mu_2$$

atau

$$Y_2 = \ln A_0 + A_1 \ln X_1 + A_2 \ln X_2 + A_3 X_3 + \mu_{12} \quad (4.2.c)$$

Dimana:  $A_0 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0$

$$A_1 = \beta_1 \alpha_1 + \beta_2$$

$$A_2 = \beta_1 \alpha_2 + \beta_3$$

$$A_3 = \beta_1 \alpha_3 + \beta_4$$

$$\mu_{12} = \beta_1 \mu_1 + \mu_2$$

$A_1$  = Pengaruh total  $X_1$  terhadap  $Y_2$

$A_2$  = Pengaruh total  $X_2$  terhadap  $Y_2$

Persamaan 4.1.b dan 4.2.b disubstitusi ke persamaan 4.3.b:

$$Y_3 = \alpha_0 \ln \lambda_0 + \lambda_1 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1) + \lambda_2 (\ln A_0 + A_1 \ln X_1 + A_2 \ln X_2 + A_3 X_3 + \mu_{12}) + \lambda_3 \ln X_1 + \lambda_4 \ln X_2 + \lambda_5 X_3 + \mu_3$$

$$Y_3 = \alpha_0 \ln \lambda_0 + \lambda_1 \ln \alpha_0 + \lambda_2 A_0 + (\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 A_1 + \lambda_3) \ln X_1 + (\lambda_1 \alpha_2 + \lambda_2 A_2 + \lambda_4) \ln X_2 + (\lambda_1 \alpha_3 + \lambda_2 A_3 + \lambda_5) X_3 + \lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_{12} + \mu_3$$

atau

$$Y_3 = \ln B_0 + B_1 \ln X_1 + B_2 \ln X_2 + B_3 X_3 + \mu_{123} \quad (4.3.c)$$

Dimana:

$$B_0 = \ln \lambda_0 + \lambda_1 \alpha_0 + \lambda_2 A_0$$

$$B_1 = (\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 A_1 + \lambda_3)$$

$$B_2 = (\lambda_1 \alpha_2 + \lambda_2 A_2 + \lambda_4)$$

$$B_3 = (\lambda_1 \alpha_3 + \lambda_2 A_3 + \lambda_5)$$

$$\mu_{123} = \lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_{12} + \mu_3$$

$B_1$  = Pengaruh total  $X_1$  terhadap  $Y_3$

$B_2$  = Pengaruh total  $X_2$  terhadap  $Y_3$

$B_3$  = Pengaruh total  $X_3$  terhadap  $Y_3$

Persamaan 4.1.b, 4.2.b dan 4.3.b disubstitusi ke persamaan 4.4.b menjadi:

$$Y_4 = \alpha_0 \ln \delta_0 + \delta_1 (\ln \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1) + \\ \delta_2 (\ln A_0 + A_1 \ln X_1 + A_2 \ln X_2 + A_3 X_3 + \mu_{12}) + \delta_3 (\ln B_0 + B_1 \ln X_1 + B_2 \ln X_2 + \\ B_3 X_3 + \mu_{123}) + \delta_4 \ln X_1 + \delta_5 \ln X_2 + \delta_6 X_3 + \mu_4$$

$$Y_4 = \alpha_0 \ln \delta_0 + \delta_1 \alpha_0 + \delta_2 A_0 + \delta_3 B_0 + (\delta_1 \alpha_1 + \delta_2 A_1 + \delta_3 B_1 + \delta_4) \ln X_1 + \\ (\delta_1 \alpha_2 + \delta_2 A_2 + \delta_3 B_2 + \delta_5) \ln X_2 + (\delta_1 \alpha_3 + \delta_2 A_3 + \delta_3 B_3 + \delta_6) X_3 + \\ \delta_1 \mu_1 + \delta_2 \mu_2 + \delta_3 \mu_{123} + \mu_4$$

atau

$$Y_4 = \ln C_0 + C_1 \ln X_1 + C_2 \ln X_2 + C_3 X_3 + \mu_{1234} \quad (4.4.c)$$

Dimana:

$$C_0 = \delta_0 + \delta_1 \alpha_0 + \delta_2 A_0 + \delta_3 B_0$$

$$C_1 = \delta_1 \alpha_1 + \delta_2 A_1 + \delta_3 B_1 + \delta_4$$

$$C_2 = \delta_1 \alpha_2 + \delta_2 A_2 + \delta_3 B_2 + \delta_5$$

$$C_3 = \delta_1 \alpha_3 + \delta_2 A_3 + \delta_3 B_3 + \delta_6$$

$$\mu_{1234} = \delta_1 \mu_1 + \delta_2 \mu_2 + \delta_3 \mu_{123} + \mu_4$$

$C_1$  = Pengaruh total  $X_1$  terhadap  $Y_4$

$C_2$  = Pengaruh total  $X_2$  terhadap  $Y_4$

$C_3$  = Pengaruh total  $X_3$  terhadap  $Y_4$

Untuk mengetahui (parameter) hubungan antara variabel baik pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung maupun total pengaruh berdasarkan sistem persamaan dan berdasarkan hasil *reduced form*, maka diperoleh model stochastic untuk masing-masing variabel secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

a) Pengaruh langsung (*direct effect*)

- $\alpha_1$  = Pengaruh langsung X1 terhadap Y1  
 $\alpha_2$  = Pengaruh langsung X2 terhadap Y1  
 $\alpha_3$  = Pengaruh langsung X3 terhadap Y1  
 $\beta_1$  = Pengaruh langsung Y1 terhadap Y2  
 $\beta_2$  = Pengaruh langsung X1 terhadap Y2  
 $\beta_3$  = Pengaruh langsung X2 terhadap Y2  
 $\beta_4$  = Pengaruh langsung X3 terhadap Y2  
 $\lambda_1$  = Pengaruh langsung Y1 terhadap Y3  
 $\lambda_2$  = Pengaruh langsung Y2 terhadap Y3  
 $\lambda_3$  = Pengaruh langsung X1 terhadap Y3  
 $\lambda_4$  = Pengaruh langsung X2 terhadap Y3  
 $\lambda_5$  = Pengaruh langsung X3 terhadap Y3  
 $\delta_1$  = Pengaruh langsung Y1 terhadap Y4  
 $\delta_2$  = Pengaruh langsung Y2 terhadap Y4  
 $\delta_3$  = Pengaruh langsung Y3 terhadap Y4  
 $\delta_4$  = Pengaruh langsung X1 terhadap Y4  
 $\delta_5$  = Pengaruh langsung X2 terhadap Y4  
 $\delta_6$  = Pengaruh langsung X3 terhadap Y4

b) Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

- $\alpha_1\beta_1$  = Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y2 melalui Y1  
 $\alpha_2\beta_1$  = Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y2 melalui Y1  
 $\alpha_3\beta_1$  = Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y2 melalui Y1  
 $\alpha_1\lambda_1$  = Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y3 melalui Y1

- $\alpha_2 \lambda_1$  = Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y3 melalui Y1  
 $\alpha_3 \lambda_1$  = Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y3 melalui Y1  
 $\beta_2 \lambda_2$  = Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y3 melalui Y2  
 $\beta_3 \lambda_2$  = Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y3 melalui Y2  
 $\alpha_1 \delta_1$  = Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y4 melalui Y1  
 $\alpha_2 \delta_1$  = Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y4 melalui Y1  
 $\alpha_3 \delta_1$  = Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y4 melalui Y1  
 $\beta_2 \delta_2$  = Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y4 melalui Y2  
 $\beta_3 \delta_2$  = Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y4 melalui Y2  
 $\lambda_3 \delta_3$  = Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y4 melalui Y3  
 $\lambda_4 \delta_3$  = Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y4 melalui Y3  
 $\lambda_5 \delta_3$  = Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y4 melalui Y3

c) Total Pengaruh (Total Effect)

- A1 = Pengaruh total X1 terhadap Y2  
 A2 = Pengaruh total X2 terhadap Y2  
 B1 = Pengaruh total X1 terhadap Y3  
 B2 = Pengaruh total X2 terhadap Y3  
 B3 = Pengaruh total X3 terhadap Y3  
 C1 = Pengaruh total X1 terhadap Y4  
 C2 = Pengaruh total X2 terhadap Y4  
 C3 = Pengaruh total X3 terhadap Y4  
 D1 = Pengaruh total X1 terhadap Y4  
 D2 = Pengaruh total X2 terhadap Y4  
 D3 = Pengaruh total X3 terhadap Y4

#### 4.5. Definisi Operasional:

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan informasi mengenai konsep/definisi variabel agar terhindar dari pemaknaan ganda. Berdasarkan klasifikasi variabel dari kerangka konseptual, maka variabel didefinisikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan ( $X_1$ ) adalah pengeluaran pemerintah (APBD) dalam hal ini realisasi total belanja daerah disetiap kabupaten/kota Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pengukuran variabel ini menggunakan data sekunder pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun 2008-2014, dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).
2. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur ( $X_2$ ) adalah pengeluaran pemerintah (APBD) dalam hal ini realisasi total belanja daerah disetiap kabupaten/kota Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada bidang infrastruktur. Pengukuran variabel ini menggunakan data sekunder pengeluaran bidang infrastruktur pada tahun 2008-2014, dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).
3. Inflasi ( $X_3$ ) adalah perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dalam penelitian ini dihitung secara tahunan (*year on year*) yaitu perubahan IHK pada suatu periode terhadap IHK pada periode yang sama tahun sebelumnya di setiap kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008-2014.

4. Investasi ( $Y_1$ ) adalah kegiatan melalui pengeluaran pada periode tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian atau imbalan pada tahun berikutnya. Investasi yang terealisasi baik PMA maupun PMDN di setiap kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008-2014, dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).
5. Kualitas SDM ( $Y_2$ ), adalah penduduk tamatan SMA ke atas (perguruan tinggi) dibagi dengan angkatan kerja pada setiap kabupaten/kota Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008-2014, dinyatakan dalam satuan persen.
6. Pertumbuhan ekonomi ( $Y_3$ ) adalah ukuran presentase rasio selisih pendapatan atau output suatu wilayah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu ( $t$ ) dengan tahun sebelumnya ( $t-1$ ) dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya ( $t-1$ ). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini merupakan PDRB berdasarkan harga konstan di setiap kabupaten/kota Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008-2014, dinyatakan dalam satuan persen.
7. Pengangguran ( $Y_4$ ) adalah angka yang menunjukkan tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal di setiap kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008-2014, dinyatakan dalam satuan jiwa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN



#### 5.1 Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun semakin mengandalkan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi semakin berkontribusi terhadap struktur perekonomian sejalan dengan perannya yang semakin meningkat. Dari sisi sektoral juga menggambarkan semakin besarnya peran sektor-sektor non migas dalam pembangunan ekonomi dan menggantikan dominasi sektor migas.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah daerah untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkadang mengalami keterlambatan pertumbuhan belanja daerah disebabkan oleh lambatnya realisasi keuangan dan fisik belanja modal.

##### 5.1.1. Pengeluaran Pemerintah

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan transfer. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (a) anggaran pendapatan, (b) anggaran belanja, (c) transfer, (d)

pendanaan. Berikut ini disajikan data pengeluaran pemerintah di Kalimantan Timur.

Tabel 5.1. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur)	
	Triwulan	Persentase
Tahun 2008	TW I	3,28%
	TW II	1,05%
	TW III	-4,75%
	TW IV	4,64%
Tahun 2009	TW I	-8,44%
	TW II	-0,91%
	TW III	6,43%
	TW IV	5,10%
Tahun 2010	TW I	5,70%
	TW II	5,11%
	TW III	3,64%
	TW IV	5,93%
Tahun 2011	TW I	7,86%
	TW II	6,75%
	TW III	7,43%
	TW IV	4,88%
Tahun 2012	TW I	4,45%
	TW II	6,74%
	TW III	4,95%
	TW IV	5,62%
Tahun 2013	TW I	3,17%
	TW II	1,31%
	TW III	5,91%
	TW IV	11,06%
Tahun 2014	TW I	4,00%
	TW II	12,35%
	TW III	21,87%
	TW IV	3,7%

Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

Pengeluaran Pemerintah Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif. Pengeluaran pemerintah pada tahun 2009 mengalami nilai negatif pada triwulan pertama dan kedua, sedangkan pada tahun 2014 pemerintah melakukan pengeluaran yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

### 5.1.2. Inflasi

Inflasi sebagai salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, dimana daya beli yang ada dalam uang dengan berjalannya waktu mengalami erosi. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Berikut ini disajikan data inflasi dari tahun 2008 sampai dengan 2014 di Kalimantan Timur.

Tabel 5.2. Laju Inflasi di Kalimantan Timur

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2008	11,05	14,90	13,99	13,06
2009	9,39	4,90	3,89	4,31
2010	5,96	5,84	7,45	7,28
2011	7,59	8,55	4,78	6,34
2012	5,78	4,83	5,39	5,60
2013	0,46	3,43	9,48	9,65
2014	8,45	7,67	4,47	7,70

Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

Laju inflasi di Kalimantan Timur tertinggi pada periode Tahun 2008 dengan rata-rata tingkat inflasi sebesar 13 persen. Pada Tahun 2013 tingkat inflasi mengalami penurunan hingga mencapai 0,46 persen. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi masyarakat dan adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada tekanan inflasi yang tinggi.

### 5.1.3. Investasi

Investasi ini dapat mempertinggi kegiatan ekonomi daerah. Kenaikan jumlah investasi selanjutnya dapat mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi produksi sehingga produksi agregat akan bertambah. Berikut ini disajikan data investasi dari tahun 2008 sampai dengan 2014 di Kalimantan Timur.

Tabel 5.3. Investasi di Kalimantan Timur

Periode	Investasi	
	PMDM (Dalam Milyar Rupiah)	PMA (USD Juta)
2008	70	-
2009	7	-
2010	7.881,29	988
2011	11.828,53	1.104
2012	2.290	245
2013	4.850	136
2014	11.050	1.89

Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

Daerah utama tujuan investasi di Kalimantan Timur adalah Kutai Timur, Kabupaten Paser, dan Kutai Kartanegara, yang merupakan daerah potensial untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara.

Kota Balikpapan sebagai daerah potensial bagi PMA khususnya pada sektor pertambangan migas dan industri pengolahannya.

#### 5.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Berikut ini disajikan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 sampai dengan 2014 di Kalimantan Timur.

Tabel 5.4. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2008	6,72	6,52	5,53	1,44
2009	0,95	1,89	0,47	2,29
2010	4,72	7,73	4,17	2,36
2011	1,34	1,83	3,76	5,16
2012	6,40	0,14	-0,59	3,98
2013	1,28	3,61	1,28	2,20
2014	5,98	3,78	4,42	3,83

Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur didorong oleh membaiknya kontraksi di sektor industri pengolahan migas, PHR serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan masih akan mengalami kontraksi.

### 5.1.5. Pengangguran

Dalam ekonomi modern, pengangguran terdiri dari beberapa penyebab, diantaranya berhubungan dengan *general causes* dalam kegiatan ekonomi dan hasil dari kegagalan pasar tenaga kerja dalam bekerja secara optimal. Berikut ini disajikan angka pengangguran dari tahun 2008 sampai dengan 2014 di Kalimantan Timur.

Tabel 5.5. Pengangguran di Kalimantan Timur

Periode	Pengangguran (Jiwa)
2008	157.376
2009	158.224
2010	166.557
2011	173.693
2012	158.263
2013	163.783
2014	144.086

Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

Berdasarkan tabel 5.5 terjadi fluktuasi angka pengangguran, data tersebut juga menunjukkan penambahan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kondisi ini juga disebabkan oleh perlambatan kondisi ekonomi di Kalimantan Timur.

## 5.2 Kondisi Makro Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/Kota

Beberapa daerah di Kalimantan Timur mengalami pemekaran wilayah pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, jumlah kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 10 kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser. Penajam Paser Utara, Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat kabupaten/kota yang masih bergabung dengan provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2008.

Tabel 5.6. Kondisi Makro Ekonomi tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Makro Ekonomi	
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	Pengangguran (Jiwa)
Kab. Paser	4,30	3.481
Kab. Kutai Barat	4,97	16.173
Kab. Kutai	3,62	5.612
Kab, Kutai Timur	3,79	2.615
Kab, Berau	5,71	21.050
Kab. Malinau	5,12	4.830
Kab. Bulongan	5,41	1.885
Kab. Nunukan	6,07	48.391
Kab. Penajam Paser Utara	6,05	33.986
Kota Balikpapan	6,36	60.664
Kota Samarinda	7,14	57.087
Kota Tarakan	6,07	65.195
Kota Bontang	6,44	46.165

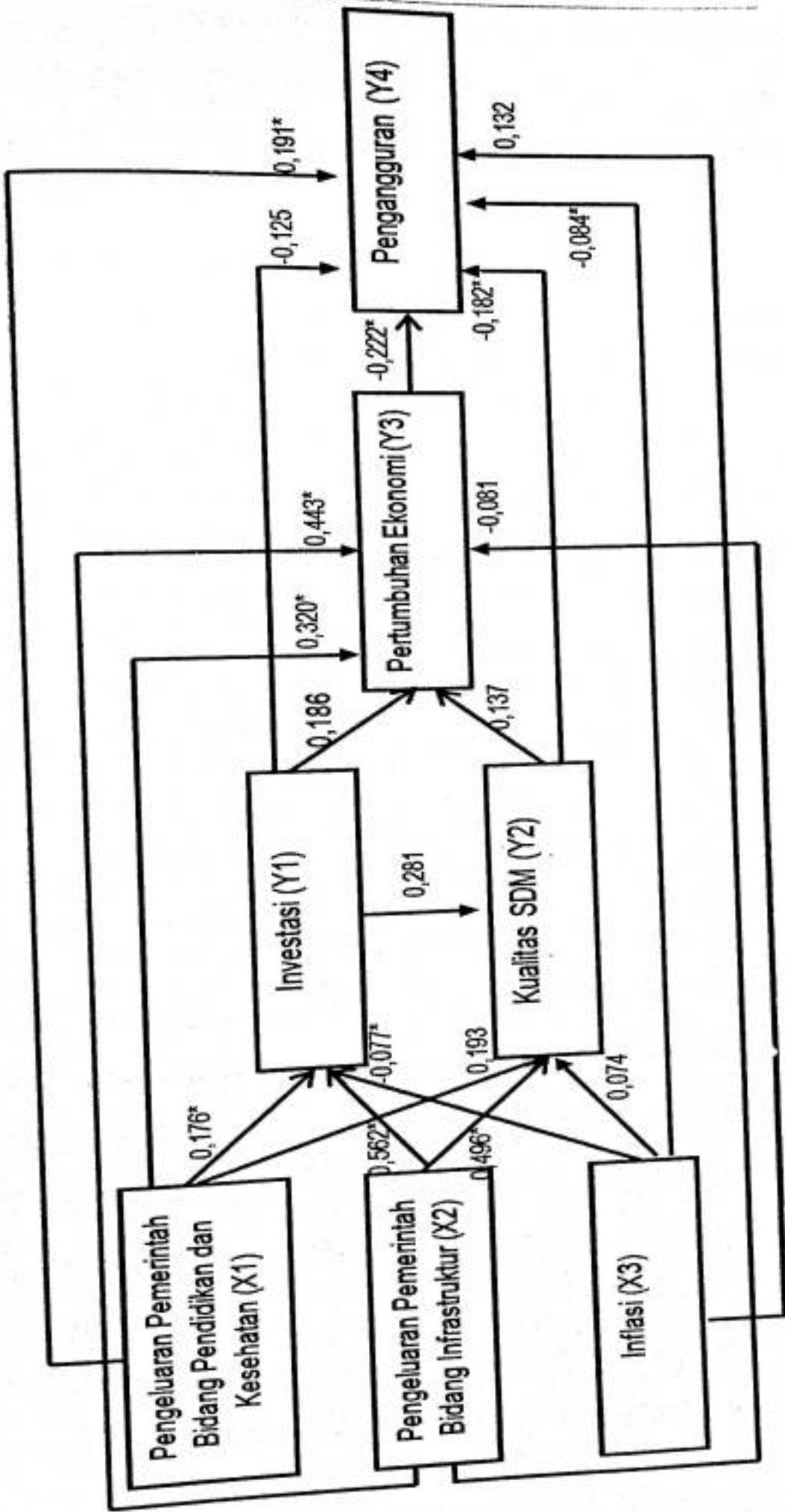
Data diolah dari Kajian Ekonomi Bank Indonesia (2015)

### 5.3 Hasil Analisis *Structural Model*

Setelah model penelitian dianalisis dengan menggunakan program AMOS versi 20.0. Dalam penelitian ini terdapat 16 hubungan antar variabel eksogen dan variabel endogen, maka untuk menganalisis hubungan fungsional variabel maka nilai koefisien disusun dalam bentuk sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.7 dan Gambar 5.1 di bawah ini:

Variabel	Variabel	Koefisien	t-Hitung	P-Value
Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan & Kesehatan) [X1]	Investasi [Y1]	0,176*	2,408*	0,016
Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan & Kesehatan) [X1]	Kualitas SDM [Y2]	0,193	1,369	0,171
Pengeluaran Pemerintah (Infrastruktur) [X2]	Investasi [Y1]	0,562*	5,645*	0,000
Pengeluaran Pemerintah (Infrastruktur) [X2]	Kualitas SDM [Y2]	0,496*	2,300*	0,021
Inflasi [X3]	Investasi [Y1]	-0,077*	-2,379*	0,017
Inflasi [X3]	Kualitas SDM [Y2]	0,074	1,185	0,236
Pengeluaran Pemerintah (Infrastruktur) [X2]	Pertumbuhan Ekonomi [Y3]	0,443*	2,997*	0,003
Inflasi [X3]	Pertumbuhan Ekonomi [Y3]	-0,081	-1,944	0,052
Investasi [Y1]	Kualitas SDM [Y2]	0,281	1,423	0,155
Investasi [Y1]	Pertumbuhan Ekonomi [Y3]	0,186	1,400	0,162
Kualitas SDM [Y2]	Pertumbuhan Ekonomi [Y3]	0,137	1,939	0,053
Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan & Kesehatan) [X1]	Pertumbuhan Ekonomi [Y3]	0,320*	3,389*	0,000
Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan & Kesehatan) [X1]	Pengangguran [Y4]	0,191*	1,998*	0,046
Pengeluaran Pemerintah (Infrastruktur) [X2]	Pengangguran [Y4]	0,132	0,897	0,370
Inflasi [X3]	Pengangguran [Y4]	-0,084*	-2,081*	0,037
Pertumbuhan Ekonomi [Y3]	Pengangguran [Y4]	-0,222*	-2,195*	0,028
Investasi [Y1]	Pengangguran [Y4]	-0,125	-0,979	0,328
Kualitas SDM [Y2]	Pengangguran [Y4]	-0,182*	-2,653*	0,008

Keterangan: \*) signifikan pada taraf 5 persen



Gambar 5.1. Hasil Estimasi

Setelah menguraikan hasil analisis hubungan fungsional antara variabel maka selanjutnya diuraikan mengenai hasil analisis jalur (path analysis) yang terdiri dari pengaruh tidak langsung dan total pengaruh antara variabel eksogen dan endogen.

Tabel 5.8. Hubungan Tidak Langsung

No.	Keterangan	Nilai Indirect
1.	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM	0,066
2.	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi	-0,152
3.	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM	0,194
4.	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi	-0,330
5.	Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM	-0,014
6.	Pengaruh inflasi terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi	0,050
7.	Pengaruh investasi terhadap pengangguran melalui kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi	-0,099
8.	Pengaruh kualitas SDM terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi	-0,050

Sumber: Pengolahan Data (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara variabel eksogen dan endogen terdiri dari delapan hubungan. Selanjutnya pada hasil analisis jalur diuraikan mengenai pengaruh total variabel eksogen terhadap variabel endogen pada tabel berikut.

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel eksogen (pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan,

pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, serta inflasi) dan endogen secara menyeluruh. Dalam mengidentifikasi pengaruh total, maka perlu diuraikan berdasarkan masing-masing variabel eksogen yang secara lengkap disajikan sebagai berikut.

### 5.3.1. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran

Pengaruh total pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran. Terdapat dua jalur pengaruh langsung yang tidak signifikan antara lain pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh investasi terhadap pengangguran. Selanjutnya diuraikan mengenai nilai total pengaruh antara variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.9. Hubungan Total

Kategori	Uraian	Nilai	Nilai Total
Pengaruh Langsung	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap investasi	0,176	1,098
	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia	0,193	
	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi	0,320	
	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran	0,191	
Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM	0,066	1,098
	Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi	-0,152	

Sumber: Pengolahan Data (2016)

Tabel 5.9 memperlihatkan nilai total pengaruh antara variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui variabel investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,098.

### 5.3.2. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran

Pengaruh total pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran. Terdapat tiga jalur pengaruh langsung yang tidak signifikan antara lain pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi; pengaruh investasi terhadap pengangguran; dan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran. Selanjutnya diuraikan mengenai nilai total pengaruh antara variabel tersebut sebagai berikut. Setelah menguraikan melalui gambar pengaruh total variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, maka selanjutnya disajikan data nilai total pengaruh berdasarkan akumulasi dari nilai pengaruh langsung dan nilai pengaruh tidak langsung sebagai berikut.

Tabel 5.10. Hubungan Total

Kategori	Uraian	Nilai	Nilai Total
Pengaruh Langsung	Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap investasi	0,562	2,157
	Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia	0,496	
	Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi	0,443	
	Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran	0,132	
Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh pengeluaran pemerintah infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM	0,194	
	Pengaruh pengeluaran pemerintah infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi	-0,330	

Sumber: Pengolahan Data (2016)

Tabel 5.10 memperlihatkan nilai total pengaruh antara variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui variabel investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,157.

### 5.3.3. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran

Pengaruh total inflasi terhadap pengangguran. Terdapat dua jalur pengaruh langsung yang tidak signifikan antara lain pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi; dan pengaruh investasi terhadap pengangguran. Selanjutnya diuraikan mengenai nilai total pengaruh antara variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.11. Hubungan Total

Kategori	Uraian	Nilai	Nilai Total
Pengaruh Langsung	Inflasi terhadap investasi	-0,077	0,380
	Inflasi terhadap kualitas SDM	0,074	
	Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi	-0,081	
	Inflasi terhadap pengangguran	-0,084	
Pengaruh Tidak Langsung	Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM	-0,014	
	Inflasi terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi	0,050	

Sumber: Pengolahan Data (2016)

Tabel 5.11 memperlihatkan nilai total pengaruh antara variabel inflasi terhadap pengangguran melalui variabel investasi, dan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,380. Selanjutnya diuraikan mengenai hubungan fungsional variabel eksogen dan endogen dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,191, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan pengangguran sebesar 19,1 persen. Nilai *t*-hitung sebesar 1,998 pada taraf signifikansi 0,046. Koefisien *standardized* 0,244 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berdampak pada kenaikan angka pengangguran sebanyak 24 orang dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pengangguran dianggap konstan.

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap investasi diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,176, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan investasi sebesar 17,6 persen. Nilai *t*-hitung sebesar 2,408 pada taraf signifikansi 0,016. Koefisien *standardized* 0,229 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berdampak pada kenaikan investasi sebesar Rp. 22,9 miliar dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dianggap konstan.

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kualitas SDM diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,193, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 1 persen, maka akan tidak berdampak pada kualitas SDM. Nilai t-hitung sebesar 1,369 pada taraf signifikansi 0,171. Koefisien *standardized* 0,149 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan tidak berdampak pada kualitas SDM dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kualitas SDM dianggap konstan.

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,320, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 32,0 persen. Nilai t-hitung sebesar 3,389 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien *standardized* 0,311 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 31,10 persen dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dianggap konstan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM adalah sebesar 0,066. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM sebesar 6,60 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa melalui peranan investasi dan kualitas SDM akan menguatkan peran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, investasi dan kualitas SDM adalah sebesar -0,152. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan angka pengangguran melalui investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,2 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa melalui peranan investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi akan menguatkan peran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan tingkat pengangguran.

**2) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi**

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,132, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur sebesar 1 persen, maka tidak berpengaruh. Nilai *t*-hitung sebesar 0,897 pada taraf signifikansi 0,370. Koefisien *standardized* 0,122 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan

sebesar Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur maka tidak berpengaruh terhadap pengangguran dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pengangguran dianggap konstan.

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap investasi diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,562, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan investasi sebesar 56,2 persen. Nilai t-hitung sebesar 5,645 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien *standardized* 0,525 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berdampak pada kenaikan jumlah investasi sebesar Rp. 52 miliar dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dianggap konstan.

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap kualitas SDM diukur menggunakan *unstandardized* sebesar 0,496, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan kualitas SDM sebesar 49,60 persen. Nilai t-hitung sebesar 2,300 pada taraf signifikansi 0,021. Koefisien *standardized* 0,278 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan sebesar Rp. 1 miliar pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur maka akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM sebesar 27,8 persen dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kualitas SDM dianggap konstan.



Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,443, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 44,3 persen. Nilai t-hitung sebesar 2,936 pada taraf signifikansi 0,003. Koefisien *standardized* 0,310 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur sebesar Rp. 1 miliar akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,1 persen dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dianggap konstan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM adalah sebesar 0,194. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM sebesar 19,4 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa melalui peranan investasi dan kualitas SDM akan menguatkan peran pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, investasi dan kualitas SDM adalah sebesar -0,330. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 33,0

persen. Hasil ini menunjukkan bahwa melalui peranan investasi, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi akan menguatkan peran pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan tingkat pengangguran.

### 3) Pengaruh inflasi terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi

Pengaruh variabel inflasi terhadap pengangguran sebesar  $-0,084$ , nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan penurunan pengangguran sebesar 08,4 persen. Nilai t-hitung sebesar  $-2,081$  pada taraf signifikansi 0,037. Koefisien *standardized* sebesar  $-0,216$  menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan inflasi sebesar 1 persen akan berdampak pada kenaikan angka pengangguran sebesar 21 orang dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pengangguran dianggap konstan.

Pengaruh variabel inflasi terhadap investasi sebesar  $-0,077$ , nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan penurunan investasi sebesar 07,7 persen. Nilai t-hitung sebesar  $-2,379$  pada taraf signifikansi 0,017. Koefisien *standardized* sebesar  $-0,201$  menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan inflasi sebesar 1 persen akan berdampak pada kenaikan investasi sebesar Rp. 20,1 miliar dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dianggap konstan.

Pengaruh variabel inflasi terhadap kualitas SDM sebesar 0,074, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan kualitas SDM sebesar 1 persen, maka tidak akan berdampak pada kualitas SDM. Nilai t-hitung

sebesar 1,185 pada taraf signifikansi 0,236. Koefisien *standardized* sebesar 0,115 menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan inflasi sebesar 1 persen tidak akan berdampak pada kualitas SDM dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dianggap konstan.

Pengaruh variabel inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,081, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen, maka akan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t-hitung sebesar -1,944 pada taraf signifikansi 0,052. Koefisien *standardized* sebesar -0,158 menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan inflasi sebesar 1 persen maka tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dianggap konstan.

Pengaruh variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,186, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 18,6 persen. Nilai t-hitung sebesar 1,400 pada taraf signifikansi 0,162. Koefisien *standardized* sebesar 0,139 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan investasi sebesar Rp. 1 miliar tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dianggap konstan.

Pengaruh variabel investasi terhadap pengangguran sebesar -0,125, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi

sebesar 1 persen, maka tidak berdampak pada pengangguran. nilai t-hitung sebesar -0,990 pada taraf signifikansi 0,322. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pengangguran dianggap konstan.

Pengaruh variabel kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,137, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan kualitas SDM sebesar 1 persen, maka akan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t-hitung sebesar 1,939 pada taraf signifikansi 0,053. Koefisien *standardized* sebesar 0,171 menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan kualitas SDM sebesar 1 persen maka tidak akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dianggap konstan.

Pengaruh variabel kualitas SDM terhadap pengangguran sebesar -0,182, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan kualitas SDM sebesar 1 persen, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan pengangguran sebesar 18,2 persen. Nilai t-hitung sebesar -2,653 pada taraf signifikansi 0,008. Koefisien *standardized* sebesar -0,299 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan kualitas SDM sebesar 1 persen maka akan berdampak pada penurunan jumlah pengangguran sebesar 29 orang dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pengangguran dianggap konstan.

Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM adalah sebesar  $-0,014$ . Ini mengindikasikan bahwa penurunan inflasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan sebesar 1,40 persen. Pengaruh inflasi terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi, investasi dan kualitas SDM adalah sebesar  $0,050$ .

## BAB VI

### PEMBAHASAN

#### 6.1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh nyata pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap investasi dan pengangguran. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada investasi dan pengangguran di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan investasi daerah ditentukan oleh kemampuan pihak pemerintah kabupaten maupun kota di Kalimantan Timur dalam mengelola secara efektif pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan bagi pengembangan kualitas masyarakat.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan temuan Wang (2005) bahwa pengeluaran pemerintah berdampak signifikan terhadap investasi swasta. Studi Njuru, et al. (2014) menemukan bahwa alokasi dana dari pemerintah sangat penting bagi investasi swasta. Demikian pula studi Basar, et al. (2011), bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi positif pada investasi swasta.

Hidayatina (2007) mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sebagai investasi yang potensial yang juga dapat berdampak pada kebijakan publik serta adanya *rate of return* dari pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang mendorong terciptanya

teknologi-teknologi baru yang inovatif serta tersedianya sumber daya manusia yang potensial serta meningkatkan produktivitas kerja.

Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di Kalimantan Timur sebesar 295,67 miliar dengan berbagai program prioritas pemerintah daerah untuk perluasan indeks pendidikan berupa pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun, pengembangan pendidikan non formal, peningkatan kualitas/mutu pendidik (tenaga kependidikan). Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp. 580,13 miliar untuk program unggulan seperti pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyehatan lingkungan dan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita.

Perubahan positif dari pengalokasian dana APBD bidang pendidikan menjadi modal utama dalam peningkatan mutu pendidikan dengan asumsi pengelolaannya secara efektif dan tepat sasaran. Pendidikan tidak semata-mata demi peningkatan pengetahuan, tetapi juga cita-cita masyarakat dalam pembangunan daerah. Hingga awal 1990-an alokasi pendidikan pada negara-negara berkembang telah menyerap sekitar 25 persen dari total pengeluaran pemerintah, demikian pula dengan pemerintah kota/kabupaten di Kalimantan Timur.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap sumber daya manusia menunjukkan pengaruh yang lemah (tidak signifikan). Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas tidak memenuhi standar signifikansi. Hasil penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan temuan Oluwatobi, et al. (2011),

Geo-Jaja, et al. (2003), dan Razmi, (2012) bahwa pengeluaran pemerintah berdampak pada pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan kecerdasan, spiritual, dan keterampilan demi mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan. Aspek pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena meliputi keahlian khusus, pengetahuan, dan kebijaksanaan, demikian pulan dengan pengkategorian pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pengalokasian APBD untuk bidang pendidikan adalah aspek paling penting dalam kebijakan penganggaran (Wang, 2005).

Sebagai negara berkembang, masyarakat masih rentan terhadap masalah kesehatan, karena menyangkut sarana kesehatan dan jaminan kesehatan dari pihak pemerintah. Kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang memadai. Kelengkapan pelayanan kesehatan menjadi kewajiban bagi pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Alokasi APBD untuk bidang kesehatan telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. UU No 36 tahun 2009 menegaskan bahwa anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, bagi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap penganggaran berpengaruh signifikan. Berdasarkan

analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas telah sesuai dengan standar signifikansi. Peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi pengangguran di Kalimantan Timur. Mengingat kondisi kesempatan kerja di daerah ini yang terbatas bagi lulusan sekolah menengah dan lulusan perguruan tinggi, hal ini mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Peranan pendidikan dan kesehatan dalam mengatasi masalah pengangguran karena pendidikan dan kesehatan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi.

Permasalahan pengangguran dapat ditinjau dari sisi *demand for labour* dan sisi *supply of labour*. Dengan menggunakan sisi permintaan tenaga kerja, maka pihak terkait dituntut untuk menciptakan lapangan kerja / kesempatan kerja baru kepada masyarakat. Penciptaan lapangan kerja dapat melalui upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam. Adanya akses masyarakat kepada sumber permodalan (perbankan atau non perbankan). Peranan investasi sangat penting baik dari pihak internal maupun eksternal. Perluasan pasar menjadi bagian dari sisi *demand for labour*, bagian ini dimulai dengan tahap perbaikan kualitas.

Sisi *supply of labour* berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai kegiatan diantaranya peningkatan dan penguatan pendidikan formal melalui penyediaan anggaran (APBD) yang proporsional, selain itu dukungan pemerintah dalam bentuk non finansial juga sangat dibutuhkan. Pengembangan sumber daya manusia dapat pula dilakukan dengan mengadakan kursus dan pendidikan lanjutan (S1, S2

dan S3). Program pelatihan yang disediakan oleh perusahaan terkait dengan pekerjaan.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan temuan Pirim, et al. (2014) bahwa alokasi dana pemerintah dapat menurunkan tingkat pengangguran. Perhatian yang rendah pemerintah dan pihak terkait terhadap pendidikan khususnya pendidikan formal tentunya menjadi tantangan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di tingkat daerah maupun antar bangsa. Todaro (1997) mengungkapkan peran pentingnya pendidikan formal yaitu (i) dapat meningkatnya angkatan kerja yang memiliki tingkat pengetahuan dan skill yang lebih tinggi, (ii) peluang kesempatan kerja yang lebih besar, (iii) adanya pimpinan baru yang terdidik dalam menjabat di suatu insititusi.

Implikasi penelitian ini berupa pentingnya alokasi dana APBD yang proporsional dan tepat sasaran khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Selain meningkatkan kuantitas alokasi pengeluaran pemerintah bidang tersebut, penting pula memperhatikan kualitas capaian target pemerintah. Efektivitas pengelolaan di daerah tercermin kemampuan pemerintah mengelola bidang-bidang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bidang penting yang harus dikelola yaitu pendidikan dan kesehatan, khususnya terkait dengan pendanaan.

Secara teoritik dan empiris bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah dengan didukung alokasi dana pemerintah akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya

manusia, hal ini didasari bahwa derajat pendidikan dan kesehatan yang sangat mempengaruhi produktivitas, kreativitas dan kompetensi masyarakat. Pendanaan bidang pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif serta mampu membedayakan masyarakat dengan pendidikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga berimplikasi pada tercapainya tujuan pemerintah dalam menekan angka pengangguran.

#### **6.2. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi**

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas telah sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah relevan dengan temuan Mihaiu, et al. (2013), Basar, et al. (2011), dan Bello, et al. (2012) bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap investasi swasta.

Todaro (2006) menjelaskan model Rostow dan Musgrave mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah (pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur) terhadap pembangunan ekonomi yaitu

tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Terdapat tiga faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara yaitu (i) akumulasi modal yang mengikuti setiap bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian ini menjelaskan rendahnya pengaruh investasi terhadap kualitas SDM di Kalimantan Timur. Secara teoritis, investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.

Faktor penting berikutnya (ii) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Faktor yang terakhir (iii) kemajuan teknologi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan pihak pemerintah daerah maupun kota di Kalimantan Timur dalam mengelola secara efektif pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur. Dalam teori ekonomi mikro tentang pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur khususnya berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan barang-barang publik. Keterkaitan antara permintaan dan penawaran barang publik dapat menentukan jumlah barang publik yang disediakan oleh pemerintah sehingga berdampak pada permintaan barang lainnya.

Merujuk pada teori ekonomi makro khususnya pada teori Rostow dan Musgrave bahwa dalam tahapan pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah terbagi atas beberapa tahap. Tahap pertama, yaitu persentase investasi pemerintah pada total investasi, maka pemerintah diharuskan untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti infrastruktur, transportasi dan sebagainya. Pada tahap kedua, peranan investasi pemerintah dibutuhkan namun investasi dari pihak swasta semakin besar. Pada tahap terakhir, pengeluaran pemerintah berfokus pada penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh *indirect effect* telah sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur akan berdampak

pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan pengelolaan investasi dan SDM di Kalimantan Timur. Temuan penelitian ini sesuai dengan Studi Gupta, et al. (1998), Oluwatobi, et al. (2011) bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur pemerintah berdampak positif pada pengembangan sumber daya manusia.

Dalam teori Wagner dikemukakan bahwa pada perkembangan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Apabila dalam perekonomian pendapatan perkapita meningkat, maka pengeluaran pemerintah juga akan ikut meningkat, karena pemerintah mengatur dampak yang timbul dalam masyarakat. Dalam teori ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belanja pemerintah terus meningkat: (i) tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (ii) kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (iii) urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (iv) perkembangan demografi, (v) birokrasi yang tidak efisien.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas tidak sesuai dengan standar signifikansi. Perubahan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur belum berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Dalam menekan angka pengangguran ditentukan oleh kemampuan pihak pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di Kalimantan Timur dalam mengelola secara efektif pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur.

Pengujian statistik tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran memiliki perbedaan dengan temuan Al-Saraireh. (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Disisi lain, temuan Nwosa, (2014) justru mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah dari pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur yaitu untuk mengurangi pengangguran. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur yang dilakukan pemerintah khususnya pada pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Pentingnya pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur disebabkan tingkat output demi kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur juga menguatkan peranan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh *indirect effect* telah sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa studi antara lain Alshahrani, et al. (2014) dan Imen & Kuehnel (2008), dengan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat mengatasi tingkat pengangguran. Tujuan pemerintah dari pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur yaitu selain untuk mengurangi pengangguran, juga untuk menurunkan tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang.



Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya infrastruktur, investasi dan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi daerah serta mengatasi masalah pengangguran. Infrastruktur jalan, saran dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, sarana dan prasarana pemukiman sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalimantan Timur memiliki kualitas infrastruktur fisik dan teknologi yang baik dan mendapatkan peringkat secara nasional, meski demikian pada tahun 2015 terjadi perlambatan kinerja pembangunan infrastruktur yang menurun, kondisi ini juga disebabkan oleh perlambatan sektor konstruksi.

### **6.3. Inflasi berpengaruh terhadap pengangguran melalui investasi, kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi**

Temuan penelitian ini menunjukkan pengaruh yang lemah antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh kemampuan pihak pemerintah daerah maupun kota di Kalimantan Timur dalam menjaga tingkat inflasi. Hasil analisis statistik mengenai hubungan antara inflasi terhadap pertumbuhan

ekonomi berbeda dengan temuan Kasidi & Mwakanemela, (2013) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, temuan Umaru & Zubairu (2012) bertentangan dengan temuan penelitian ini bahwa inflasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus) dapat disebabkan oleh tingginya nilai tukar mata uang luar negeri terhadap mata uang dalam negeri (Rupiah). Inflasi menurut teori Keynes terjadi disebabkan pola hidup yang diluar kemampuan secara ekonomi (konsumtif). Teori Keynes juga menyoroti mengenai perebutan sumber ekonomi antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Merujuk pada teori strukturalis inflasi bersumber dari kekakuan struktur ekonomi.

Ketika peningkatan *aggregat demand* dalam jangka panjang yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar sehingga akan menghasilkan peningkatan harga. Kondisi tersebut terjadi karena dalam jangka panjang perekonomian sudah dalam kondisi *full-employment* sehingga upaya untuk meningkatkan *aggregate demand* hanya akan menghasilkan inflasi dan tidak menambah output.

Pengaruh inflasi terhadap pengangguran dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan SDM menunjukkan pengaruh signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh *indirect effect* telah sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan inflasi akan berdampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran dengan mempertimbangkan aspek investasi dan SDM. Hasil penelitian ini diperkuat dengan studi Onwe & Olarenwaju, (2014) dan Valadkhani, (2004) bahwa inflasi jangka panjang akan berdampak pada investasi.

Selama periode inflasi terjadi, tingkat harga dan upah tidak bergerak dalam tingkatan yang sama, maka inflasi akan memberikan dampak redistribusi pendapatan dan kekayaan diantara golongan ekonomi dalam masyarakat. Serta menimbulkan terjadinya distorsi dalam harga relatif, output, dan kesempatan kerja, dan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak positif dari inflasi menyebabkan peredaran dan perputaran barang lebih cepat di masyarakat sehingga produksi barang-barang bertambah, dan keuntungan pengusaha bertambah. Kesempatan kerja bertambah, karena terjadi tambahan investasi yang tercipta berarti membuka banyak lapangan kerja baru sehingga masalah pengangguran dapat berkurang. Ketika inflasinya terkendali dan diikuti dengan pendapatan nominal yang bertambah, maka pendapatan riil masyarakat meningkat.

Pengaruh inflasi terhadap pengangguran menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas telah sesuai dengan standar signifikansi. Tingkat inflasi yang normal dapat berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini didukung oleh Katria, et al. (2012),

Todorova, (2012) dan Lisý & Muchová, (2014) bahwa inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif di beberapa negara.

Pada saat jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.

Pengaruh inflasi terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh *indirect effect* telah sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan inflasi akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan temuan Lisý & Muchová, (2014).

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung dari parah atau tidaknya tingkat inflasi itu sendiri. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan

investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiper inflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Pada saat inflasi tinggi tidak akan mendorong perkembangan ekonomi karena (i) ketika biaya produksi naik akibat inflasi, (ii) pada saat kondisi harga tidak menentu (inflasi) para pemilik modal lebih cenderung menanamkan modalnya pada bentuk pembelian tanah, (iii) inflasi menimbulkan efek buruk pada perdagangan dan mematikan pengusaha dalam negeri, dan (iv) inflasi dapat menimbulkan dampak yang buruk pada neraca pembayaran (Murni, 2006).

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas tidak sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan investasi belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan pihak pemerintah daerah maupun kota di Kalimantan Timur dalam mengelola investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Hasil statistik antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda dengan temuan Haider, et al. (2007) dan Hashmi, et al. (2012) bahwa investasi swasta dan publik berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu Ghani, & Din (2006) menyatakan hal menyatakan bahwa investasi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya terdapat perbedaan substansi antara dampak investasi swasta dan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi otonom pada umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya seperti pembangunan infrastruktur.

Keterkaitan investasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi didasari atas beberapa teori. Pertama, teori Gradualist. Teori ini berpendapat bahwa negara yang terbelakang sebaiknya jangan mengadakan industrialisasi cepat-cepat sebab resiko dan kekeliruan-kekeliruan akan terlalu besar untuk dipikul. Injeksi kapital yang banyak adalah kurang baik sampai perekonomian tersebut mampu menyerapnya.

Pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif daripada faktor-faktor produksi. Harus diusahakan untuk memajukan industri-industri kecil, pembangunan masyarakat desa yang menggunakan kelebihan tenaga buruh. Kegiatan yang membutuhkan kapital yang banyak akan diusahakan bila keuntungan melebihi dari kegiatan yang sifatnya padat karya (*labor intensive*).

Teori kedua, teori Big Push, teori ini secara singkat mengatakan bahwa bila hanya ada sedikit-sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan,

hal ini hanya mendorong pertumbuhan penduduk saja yang nantinya akan menghambat kenaikan pendapatan perkapita. Oleh karena itu, usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan-perubahan penduduk. Implikasinya ialah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang-kadang membutuhkan modal yang besar.

Konsentrasi pada investasi yang selanjutnya menghasilkan alat-alat modal untuk mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan output. Konsumsi sebaliknya ditekan, sehingga investasi dapat terus ada. Titik berat pada "*economic of scale*" yang berupa produksi massa (*large scale production*) dan tentunya juga membutuhkan modal yang banyak.

Teori ketiga, *Balanced Growth*. Teori ini menitikberatkan bahwa perekonomian itu ada kemungkinan untuk berkembang apabila ada keseimbangan yang baik antara berbagai-bagai sektor di dalam perekonomian. Dengan pertumbuhan seimbang (*balanced growth*) ini diartikan bahwa perkembangan ekonomi tidak akan berhasil bila investasi hanya sebatas pada "titik pertumbuhan" (*growing point*) tertentu atau sektor-sektor yang sedang berkembang saja, sebab sektor-sektor lain berhubungan erat. Investasi harus disebar pada semua sektor sehingga memperluas pasar antara satu sektor dengan sektor lainnya. Makin erat hubungan saling ketergantungan antar berbagai sektor maka pasar akan semakin kuat. Untuk mewujudkan teori ini tentu saja harus didukung oleh investasi yang besar.

Teori keempat, *Unbalanced Growth*. Teori ini dikemukakan oleh Hirschman (1992) yang pada awalnya mengkritik teori pembangunan seimbang. Menurutnya bahwa masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya tidak dapat merubah sistem perekonomian yang tradisional menjadi sistem yang modern. Disamping itu, kapital yang besar tidak dapat disediakan oleh negara yang masih berkembang. Justru dengan tidak adanya keseimbangan akan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih cepat dan biaya-biaya ekspansi dapat diminimumkan. Bila satu sektor masih rendah outputnya maka akan tetap ada permintaan yang banyak di sektor lain dan akan ada suatu keuntungan super normal pada sektor yang rendah outputnya

Pengaruh kualitas SDM terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan terdapat pengaruh yang lemah (tidak signifikan). Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas tidak sesuai dengan standar signifikansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Studi Arabi, et al. (2013) dan Wilson & Briscoe, (2004) bahwa kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh negatif signifikan. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai t-hitung dan probabilitas telah sesuai dengan standar signifikansi. Pengaruh antara variabel tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Hasil

penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam menurunkan tingkat pengangguran ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil analisis statistik mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dipertegas pula oleh Özel, et al. (2013) dan Neto & Silva, (2013) dalam temuannya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Disisi lain, Herman, (2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkontribusi besar pada penurunan tingkat pengangguran.

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran merujuk kepada hukum Okun yang menyatakan bahwa pada saat terjadi penurunan GDP sebesar 2 persen yang berkaitan dengan GDP potensial, maka berdampak pada peningkatan angka pengangguran sekitar 1 persen. Hukum tersebut menjelaskan keterkaitan yang erat antara pasar output dan pasar tenaga kerja, dengan hubungan antara pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Dalam model yang dikembangkan oleh Solow-Swan melalui pendekatan neo-klasik menunjukkan rasio pertumbuhan modal-tenaga kerja,  $k$  (disebut sebagai pendalaman modal atau *capital deepening*), dan menunjukkan bahwa pertumbuhan  $k$  tergantung pada tabungan  $sf(k)$ , setelah memperhitungkan jumlah modal yang diperlukan untuk depresiasi,  $\delta k$ , dan setelah perluasan modal, yakni pemberian jumlah modal yang ada per tenaga kerja kepada tenaga kerja baru neto yang memasuki angkatan kerja,  $nk$  (Todaro, 2006).

Perekonomian yang mengalami pertumbuhan positif, maka permintaan dan penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi maka jumlah pengangguran akan turun. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah maka jumlah pengangguran semakin meningkat, sehingga keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran menjadikan perhatian penting dari pemerintah daerah.

Mencermati hasil analisis inflasi terhadap pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi swasta, kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, maka implikasi penelitian ini mengemukakan peranan inflasi yang sama pentingnya dengan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas perekonomian daerah.

Implikasi lainnya dalam penelitian ini berupa kemampuan pemerintah daerah menghadapi kebijakan eksternal berupa penyesuaian harga komoditas. Pentingnya menjaga kinerja perekonomian daerah dengan meningkatkan konsumsi dan investasi pada tingkat tertentu, demikian pula peranan pemerintah daerah yang sangat penting dalam meningkatkan produksi sektor pertanian.

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. Simpulan

- 1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya pada kabupaten/kota terbukti dapat meningkatkan investasi. Disisi lain, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan belum mampu meminimalisir tingkat pengangguran di Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan sebagai upaya mewujudkan keberhasilan strategi kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten.
- 2) Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berdasarkan pengujian statistik dinyatakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan SDM. Peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur pemerintah daerah memacu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dengan memperhatikan aspek investasi baik dari pemerintah maupun swasta serta peningkatan produktivitas manusia. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tidak berdampak pada penurunan tingkat pengangguran hal ini disebabkan kebijakan

strategis pemerintah kabupaten dan kota yang di bidang infrastruktur yang belum memenuhi target. Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dikaitkan dengan pengangguran dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di daerah. Dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah mengharapkan terjadinya pengurangan tingkat pengangguran, serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur.

- 3) Inflasi tidak memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kualitas SDM. Tingkat inflasi yang dapat diturunkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain memiliki dampak negatif, inflasi juga memiliki sisi positif pada perputaran barang yang memicu investasi dari pihak pemerintah dan swasta. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Pada saat perekonomian daerah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat maka terjadi inflasi tarikan permintaan. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan pertumbuhan

ekonomi akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Kalimantan Timur.

## 7.2. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah daerah berperan aktif dalam mengelola sektor publik khususnya berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian periode sebelumnya. Program pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran diharapkan untuk dikembangkan pada periode berikutnya, sedangkan program pemerintah yang dinilai rendah maka diperlukan evaluasi dan kebijakan (regulasi). Pentingnya program manajemen pelayanan pendidikan dengan melakukan perencanaan serta pengendalian mutu pendidikan di daerah. Demikian pula program kesehatan yang mendukung terciptanya kualitas sumber daya kesehatan yang profesional sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Diharapkan agar koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota lebih intensif dan bersinergi dalam mengarahkan kebijakan anggaran infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini diharapkan menjadi stimulus untuk perekonomian Kalimantan Timur, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan.

3. Perlunya sinergitas antara pihak pemerintah daerah dan perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Timur untuk mendukung stabilitas harga komoditas dan sektor riil. Pentingnya komitmen dari seluruh pimpinan (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk menekan inflasi dengan menjamin ketersediaan pasokan di daerah, menjamin keterjangkauan harga barang pokok, menjamin kelancaran distribusi, dan adanya komunikasi yang efektif.

### 7.3. Kontribusi Penelitian

#### 7.3.1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi pada model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, dan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbalik. Kontribusi tersebut berperan penting dalam menjaga perkembangan kinerja pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan aspek investasi dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Kontribusi pada perkembangan pengeluaran pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengkaji faktor yang menimbulkan *demand* (permintaan) barang publik serta berbagai faktor yang

mempengaruhi ketersediaan barang publik. Hukum Wegner juga berkontribusi dalam penelitian ini khususnya terkait pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan pengeluaran sektor publik meningkat.

- 3) Kurva Phillips berkontribusi besar dalam menjelaskan keterkaitan antara tingkat kenaikan harga dengan tingkat pengangguran. Teori tersebut menyiratkan sifat yang saling berkaitan antara faktor inflasi harga dan jumlah pengangguran.

### 7.3.2. Kontribusi Empiris

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wang (2005) yang mengemukakan pengeluaran pemerintah mempengaruhi investasi swasta. Studi Njuru, et al. (2014), pengeluaran pemerintah sangat penting bagi investasi swasta. Demikian pula studi Basar, et al. (2011), bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi positif pada investasi swasta. Perbedaan hasil penelitian ini dengan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya temuan Oluwatobi, et al. (2011), Geo-Jaja, et al. (2003), dan Razmi, (2012), pengeluaran pemerintah berdampak pada pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mihaiu, et al. (2013), Basar, et al. (2011), dan Bello, et al. (2012) bahwa pengeluaran

pemerintah berdampak positif terhadap investasi swasta. Studi Gupta, et al. (1998), Oluwatobi, et al. (2011) bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur pemerintah berdampak positif pada pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan hasil penelitian ini dengan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Nwosa, (2014) justru mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.



- 3) Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kasidi & Mwakanemela, (2013), inflasi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Onwe & Olarenwaju, (2014) dan Valadkhani, (2004) bahwa inflasi jangka panjang akan berdampak pada investasi. Perbedaan hasil penelitian ini dengan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Umaru & Zubairu (2012) bertentangan dengan temuan penelitian ini bahwa inflasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 7.3.3. Kontribusi Praktis

1. Perbaikan laju perekonomian daerah ditentukan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Melakukan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, peningkatan kualitas promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat,

pengembangan lingkungan sehat, program obat dan perbekalan kesehatan, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kesehatan.

2. Kontribusi praktis terkait dengan kebijakan infrastruktur yaitu pengeluaran pemerintah yang berfokus pada penyediaan prasarana ke aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan. Infrastruktur fisik dan teknologi dengan skal besar akan mampu memberi sentiment positif kepada investor swasta agar tercapai percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Kontribusi praktis dalam penelitian ini adalah pentingnya mencermati respon konsumen terhadap kebijakan pemerintah pusat khususnya terkait dengan harga energi. Hal ini dapat terwujud dengan paket kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah Daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 9, No. 1.
- Algifari, G.M. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Al-Saraireh, Shardi Irshaid. (2014). The relationship between unemployment rate in Jordan with rates of foreign labor force, government expenditure, and economic growth. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 5, No. 3.
- Alshahrani, Saad A., Alsadiq, Ali J. (2014). Economic growth and government spending in Saudi Arabia: an empirical investigation. *IMF Working Paper*. WP/14/3.
- Arabi, Khalafalla Ahmed Mohamed., Abdallah, Zakaria Suliman. (2013). The impact of human capital on economic growth: empirical evidence from Sudan. *Research in World Economy*. Vol. 4, No.2.
- Arsyad, L. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Astri A, 2004. Analisis Kesempatan Kerja di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Thesis*. Semarang: FE Undip.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika ekonomi daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Bahl, Roy W. and Sally Wallace, 2001, *Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension*. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization
- Basar, Selim., Polat, O., Oltulular, S. (2011). Crowding out effect of government spending on private investments in Turkey: A cointegration analysis. *Journal of the Institute of Social Sciences*. No. 8. Autumn: 11-20.
- Bahl, Roy W. ,2000. *China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge University Press., 2002, "Implementation

- Rules For Fiscal Decentralization", *Working Paper*, Georgia State University.
- Badan Pusat Statistik, 2011. *PDRB Kalimantan Timur*. Samarinda: BPS dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.
- 
- \_\_\_\_\_ 2011. *Kalimantan Timur Dalam Angka*. Semarang : BPS dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.
- 
- \_\_\_\_\_ 2015. *Kalimantan Timur Dalam Angka*. Semarang : BPS dan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Balcerzak, A.P., Zurek, M. (2011). Foreign direct investment and unemployment: VAR analysis for Poland in the Years 1995 – 2009. *European Research Studies*. Vol. XIV. Issues (1).
- Barro, R.J. (1991). Economic Growth in a Cross-Section of Countries. *Quartely Journal of Economic*. Vol. 16 (2).
- Barzelay, M. 1991. Managing Local Development, Lesson from Spain". *Policy Sciences*, 24, 271-290.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Bayar, Y. (2014). Effects of economic growth, export and foreign direct investment inflows on unemployment in Turkey. *Investment Management and Financial Innovation*. Vol. II, Issue. 2.
- Becker, G.S. 1975. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. The University of Chicago Press.
- Bello, M. Z., Nagwari, A.B., Saulawa, M.A. (2012). Crowding in or crowding out? Government spending and private investment: The case of Nigeria. *European Scientific Journal*. Vol. 8 No. 28.
- Berument, H., Dogan, N., Tansel, A. (2006). Economic performance and unemployment: evidence from an emerging economy. *International Journal of Manpower*. Vol. 27, Iss 7.

- Birchenall, Javier A. (2002). Growth and unemployment (without market frictions). University of California at Santa Barbara.
- Bird, Richard M., 1990. "Intergovernmental Finance and Local Taxation in Developing Countries Some Basic Consideration for Reformers". *Public Administration and Development*.
- Bird, Richard M., and Francois Vaillancourt, 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Seri Sinopsis Pengantara Ilmu Ekonomi. Edisi 1, Cetakan ke 5. BPFE. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Ekonomi Moneter*, Seri Sinopsis Pengantara Ilmu Ekonomi. BPFE. Yogyakarta
- Boozer, M., Ranis, G., Stewart, F., Suri, T. (2003). Paths to success: The Relationship Between Human Development and Economic Growth. *Economic Growth Center. Yale University. Center Discussion Paper No. 874*.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta. Lembaga Penelitian. Universitas Atma Jaya.
- Chimobi, O.P. (2010). Inflation and economic growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*. Vol. 3, No. 2.
- Choudhry, M.T., Marelli, E., Signorelli, M. (2012). Youth unemployment rate and impact of financial crises. *International Journal of Manpower*. Vol. 33, Iss 1.
- Chude, N.P., Chude, D.I. (2013). Impact of government expenditure on economic growth in Nigeria. *International Journal of Business and Management Review*. Vol. 1, No. 4.
- Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.
- Davey, KJ., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan: Amanullah dkk. Jakarta: Penerbit UI-Press.

- Denburg, T. F. 1985. *Makroekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan*. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1993. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Eatwell, J. (2000). Unemployment: national policies in a global economy. *International Journal of Manpower*. Vol. 21. Iss 5.
- Fallahi, F., Pourtaghi, H., Rodriguez, G. (2012). The unemployment rate, unemployment volatility, and crime. *International Journal of Social Economics*. Vol. 39, Iss 6.
- Funk, L. (2011). Strategic policy to fight Germany's unemployment problem. *International Journal of Manpower*. Vol. 22 Iss 6.
- Ganelli, G. 2003. Useful Government Spending, Direct Crowding-Out and Fiscal Policy Interdependence. *Journal of International Money and Finance*. Vol. 22 (1).
- Gangji, A., Plasman, R. (2008). Microeconomic analysis of unemployment persistence in Belgium. *International Journal of Manpower*. Vol. 29, Iss 3.
- Ghani, E., Din, Musleh-Ud. (2006). The impact of public investment on economic growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review*. 45: 1.
- Gorodnichenko, Y. 2001. "Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments : The Case of Ukraine". *Master Thesis, University*
- Green, R. (2000). Unemployment: perspectives and policies. *International Journal of Manpower*. Vol, 21. Iss 5.
- Gujarati, Damodar N., 2005. *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill.
- Gupta, S., Clements, B., Tiongson, E. (1998). Public spending on human development. *Finance & Development*. Vol. 35, No. 3.

- Gurpur, S., Rautdesai, R. (2014). Revisiting legal education for human development: best practices in South Asia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 157.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. •
- Haider, Syed Adnan., Bukhari, Ali Shah., Ali, Liaqat., Saddaqt, M. (2007). Public investment and economic growth in the three dragons: Evidence from heterogeneous dynamic panel data. *International Journal of Business and Information*. Vol. 2, No. 1.
- Haryo Kuncoro, 2000. Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsivitas Sektor Swasta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 5 No. 1 Hal.:53-59, Surakarta: Penerbit BPPE FE-UMS.
- Hashmi, M.H., Akram, W., Hashmi, A.A. (2012). Role of investment in the course of economic growth in Pakistan. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*. Vol. 1, No. 5.
- Herman, Emilia. (2011). The impact of economic growth process on employment in European Union Countries. *The Romanian Economic Journal*. Year XIV. No. 2.
- Heylen, F., Schollaert, A., Evaraert, G., Pozzi, L. (2013). Inflation and human capital formation: Theory and panel data evidence. *Working Paper*. Universiteit Gent. *Faculteit Economie En Bedrijfskunde*.
- Herlambang, T., Brastoro, S., Kelana, S. 2001. *Ekonomi Makro: Teori Analisis dan Kebijakan*. Ghalla. Indonesia. Jakarta.
- Hirschman, E.C. (1992). The Consciousness of Addiction: Towards a General Theory of Compulsive Consumption. *Journal of Consumer Research*.
- Hidayatina, A. (2007). *Analisis kinerja dan efisiensi sektor public dalam era desentralisasi fiskal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah: Metode Tobit-FDH*. UNDIP Semarang.
- Ifeakachukwu, N.P., Omodadepo, A.O., Oluseun, A.A. (2013). An analysis of the relationship between public spending components and private

- investments in Nigeria. *Journal of Finance & Economics*. Vol. 1, Iss 2.
- Isdijoso, Brahmantio, dan Tri Wibowo, 2002, Analisis Kebijakan Fiskal Pada Otonomi Daerah, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6 No.1.Hal.15-25.
- Jamli, A. 2001. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta. BPFE.
- Jamzani, S. (2007). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus data panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12, No. 1.
- Jhingan, M.L. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Kaho, Riwu Josef, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kasidi, F., Mwakanemela, K. (2013). Impact of inflation on economic growth: A case study of Tanzania. *Asian Journal of Empirical Research*. Vol 3 (4).
- Katria, S., Bhutto, N.A., Butt, F., Domki, A.A., Khawaja, H.A., Khalid, J. (2012). Tradeoff between inflation and unemployment. *Proceedings of 2<sup>nd</sup> International Conference on Business Management*.
- Keynes, J.M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Brace and World. Harcourt.
- Khan, Mohsin S. (1996). Government investment and economic growth in the developing world. *The Pakistan Development Review*. 35: 419-439.
- Khusaini, Muhamad, 2006, *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE Unbraw.

- Kuncoro, Haryo, 2000. "Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsivitas Sektor Swasta". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 5 No. 1 Hal. :53-59, Surakarta :Penerbit FE-UMS.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurt, S. (2015). Government health expenditures and economic growth: A Feder-Ram approach for the Case of Turkey. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 5 (2).
- Kustepeli, Y. 2005. Effectiveness of Fiscal Spending: Crowding out and/or crowding in. *Yonetim ve Ekonomi Journal* 12 (1).
- Kuznets, S. 1966. *Modern Economic Growth*. Yale Univeristy Press.
- Lisý, Ján., Muchová, Eva. (2014). Inflation vs. Unemployment – some polimic Issues. *European Scientific Journal*. Vol. 1.
- Loizides, J., Vamvoukas, G. (2005). Government expenditure and economic growth: Evidence from trivariate causality testing. *Journal of Applied Economics*. Vol. VIII. No. 1.
- Mahi, Raksaka, 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi. *Analisa CSISXXIX*, Hal. 54-66, Jakarta: Indonesia Project, Jakarta.
- Mankiw, N.G. 2000. *Teori Makroekonomi*. Edisi Keempat. (Terjemahan: Imam Nurmawan). Jakarta. Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta. Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Makroekonomi*. Edisi Kesepuluh. Jakarta. Erlangga.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPF-UGM.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Ekonomi Publik* Edisi Ke-5. Yogyakarta: BPF-UGM.

- Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab. 2001. "Fiscal Decentralization and Economic Growth". *International Studies Program Working Paper*. Atlanta : Andre Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Mekdad, Y., Dahmani, A.m Louaj, M. (2014). Public spending on education and economic growth in Algeria: Causality test. *International Journal of Business and Management*. Vol. II (3).
- Mihaiu, Diana Marieta., Opreana, A. (2013). The analysis of the relationship between the level of the public expenditure for investment and de degree of development of the society in Romania. *Procedia Economics and Finance* 6: 654-661.
- Mucuk, M., Demirsel, M.T. (2013). The effect of foreign direct investment on unemployment: Evidence from panel data for seven developing countries. *Journal of Business, Economics & Finance*. Vol. 2, Issue. 2.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro*. Jakarta. PT. Refika Aditama.
- Mursinto, Djoko, 2004, *Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur*, *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu Kajian Normatif)*. *Majalah Ekonomi*. No. 2. Tahun XIV.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance : In Theory and Practice*. Mc-Graw Hill. Tokyo : Kogakhusa Ltd.
- Mutasya, Tata, 2005, *Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel: Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini?*, The Indonesian Institute. [www.theindonesianinstitute](http://www.theindonesianinstitute).
- Nanga, M. 2001. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Pertama, Jakarta. Rajawali Pres.
- Neto, A., Silva, S.T. (2013). Growth and unemployment: A bibliometric analysis on mechanisms and methods. *FEP Working Papers*. July.

- Njuru, Stephen Gitahi., Ombuki, C., Wawire, N., Okeri, S. (2014). Impact of government expenditure on private investment in Kenya. *Researchjournal's Journal of Economics*. Vol. 2, No. 8.
- Nopirin. 1987. *Ekonomi Moneter*. Buku 2. Edisi I. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Nwosa, P. I. (2014). Government expenditure, unemployment and poverty rates in Nigeria. *JORIND 12 (1)*.
- Oates, W, 1993, Fiscal Decentralization and Economic Development, *National Tax Journal*, XLVI. 237-243. Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Oluwatobi, S.P., Ogunrinola, I. Oluranti. (2011). Government expenditure on human capital development: Implications for economic growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*. Vol. 4, No. 3.
- Onwe, O.J., Olarenwaju, R.R. (2014). Impact of inflation on corporate investment in the sub-saharan African Countires: An empirical analysis of the west-African monetary zone. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 5, No. 8 (1).
- Özel, Hasan Alp., Sezgin, Funda, H., Topkaya, Ö. (2013). Investigation of economic growth and unemployment relationship for G7 countries using panel regression analysis. *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 4, No. 6.
- Pancawati, N. 2000. Pengaruh rasio capital tenaga kerja, tingkat pendidikan, stok capital dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15. No. 2.
- Phillips, A. 1958. The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom. *Economica*. 25.
- Pigou, A.C M.A., 1960. *The Economic of Welfare*. Fourth Edition., London; Mac Millan & CO LTD
- Pirim, Z., Owings, W.A., Kaplan, L.S. (2014). The Long-Term Impact of Educational and Health Spending on Unemployment Rates. *European Journal of Economic and Political Studies* 7: 49-69.

- Prasetyo, A.D., Zuhdi, U. (2013). The government expenditure efficiency towards the human development. *Procedia Economics and Finance* 5: 615-622.
- Prud'homme, Remy, (1995). "On the Danger of Decentralization", Washington D.C., The World Bank, *Policy. Research Working Paper*, 1252.
- Ramirez, A., G.Rannis, and F. Stewart, 1998, *Economic Growth and Human Capital*, QEH Working Paper No.18. Riwu Kaho, Josef, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ranis, G., Stewart, F. (2001). Growth and Human Development: Comparative Latin American Experience. *Working Paper 826, Economic Growth Center, Yale University*.
- Ranis, Gustav. (2004). *Human Development and Economic Growth*. Yale University.
- Razmi, M.J. (2012). Investigating the effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*. Iss 5.
- Reinikka, L., Svensson, V. 2000. *Investment and Poverty in Uganda & Kamerun*. Ngoyen University South Africa.
- Rostow, Musgrave. 1996. *Pembangunan Ekonomi*. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Royal, C., O'Donnell, L. (2008). Emerging human capital analytics for investment processes. *Journal of intellectual capital*. Vol. 9, Iss 3.
- Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. 1996. *Makro Ekonomi*. Edisi Ke 17. Cetakan ketiga. Jakarta. Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Ilmu Makroekonomi*. Edisi Ke 17. Jakarta. PT Media Global Edukasi.
- Schultz, T.W. 1961. Investment in Human Capital. *The American Economics Review*. No. 51.

- Spechler, Martin C., 1990, *Perspectives in Economic Thought*, Singapore: McGraw-Hill Publishing Company.
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE-UI.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi 2001. Jakarta: LPFE-UI.
- Sinevičienė, L., Deltuaitė, V. 2014. Short-Run and Long-Run Causality Between the Structure of Financial System and Economic Development. *Scientific Journal of RTU*.
- Sitepu, R. K., Sinaga, B.M. 2005. Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. *Jurnal Ekonomi. IPB*.
- Smoke, Paul, 2001. *Fiscal Decentralization in East and Southern Africa*. New York: New York University.
- Spechler, Martin C., 1990, *Perspectives in Economic Thought*, Singapore: McGraw-Hill Publishing Company.
- Subri, Mulyadi, 2002, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rajawali Persada
- Sugiyanto, 2000. Kemandirian dan Otonomi Daerah. *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang: FE UNDIP.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. 2000, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Kencana.
- Strauss, John, Kathleen Beegle, Agus Dwianto, Yulia Herawati, Daan Pattinasarany, Elan Setiawan, Bondan Sikoki, Sukamdi, dan

- Firman Witular, 2002. *Indonesian Living Standards Three Years after the Crisis: Evidence from the Indonesia Family Life Survey*, Laporan Penelitian yang Dibiayai oleh Partnership on Economic growth (PEG) Usaid dan World Bank, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus TH. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", *Indonesian journal of Economics and Development*, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh). Jakarta. Erlangga.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C. 2003. *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom: Pearson Education Limited.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pembangunan Ekonomi*  
Jakarta. Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Economic Development*  
Eleventh Edition. United States. Addison Wesley.
- Todorova, T. (2012). The economic dynamics of inflation and unemployment. *Theoretical Economics Letters*. 2.
- Umaru, A., Zubairu A.A. (2012). Effect of inflation on the growth and development of the Nigerian economy (An empirical analysis). *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 3. No 10.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- UNSFIRS, 2000. *Indonesia: the National Human Development Report, 2000*. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIRS) and UNDP.
- UNDP, 1994. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press
- Usmaliadanti, C. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Universitas Diponegoro.
- Valadkhani, A. (2004). What determine private investment in Iran?. *International Journal of Social Economics*. 31 (5/6).
- Wagner, A. 1883. Three Extracts on Public Finance. *Extracts from Finanzwissenschaft*. Part 1. (3).
- Wahyudi. 2011. *Panen Cabai Sepanjang Tahun*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Wang, B. (2005). Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence. *Empirical Economics*. 30: 493-504.
- Waud, N.R., 1992, *Macroeconomics*, Fifth Edition, New York: Harper Collins Publisher.
- Wenny Ana A, 2004. Analisis Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Tekstil di Jawa Tengah, *Thesis*, Semarang: Pascasarjana Undip,
- Wibowo, Arif, 2005. *Pengantar Analisis Jalur*, Surabaya: LPPM Unair Surabaya.
- Wilson, Rob A., Briscoe, Geoff. (2004). The impact of human capital on economic growth: a review. *Third report on vocational training research in Europe*.
- Winarna Surya Adisubrata, 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Whithaker, William H. and Ronald C. Frederico, 1997. *Social welfare in Today's World*, Second Edition. New York: the McGraw-Hill Companies.
- Yelwa, M., David, Okoroafor, O.K., Awe, E.O. (2015). Analysis of the relationship between inflation, unemployment and economic growth in Nigeria: 1987-2012. *Applied Economics*.
- Zeb, N., Qiang, F., Sharif, M.S. (2014). Foreign direct investment and unemployment reduction in Pakistan. *Int. J. Eco. Vol. 5, Iss. 2*.
- Zhang Tao and Zou Heng-Fu, 1998, Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, *Journal of Public*